

RENCANA STRATEGIS



DINAS KESEHATAN

PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2025 - 2029



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2025-2029, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional dan sasaran Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDG's).

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Besar harapan kami dengan perencanaan strategis ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota maupun pihak-pihak lain yang memerlukan dalam rangka penyusunan perencanaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan serta kebijakan khususnya dibidang kesehatan.

Samarinda, 7 November 2025

Kepala Dinas,

Dr. dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ.,M.Kes.,MARS
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19710720 200604 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR LAMPIRAN	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DANISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	8
2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	20
2.1.3 Capaian Kinerja Pelayanan	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	51
2.1.5 Mitra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemberian Pelayanan.....	53
2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kineja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.....	56
2.1.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	57
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	58
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.....	58
2.2.2 Isu strategis.....	59
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	62
3.1 Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	63

3.2	Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	65
3.3	Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.....	68
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN		74
4.1	Program, Kegiatan, Subkegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.....	74
4.2	Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	134
4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.....	139
4.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.....	142
BAB V PENUTUP.....		146
LAMPIRAN.....		148



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berdasarkan Permenkes No. 6 Tahun 2024.....	21
Tabel 2.2 Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	22
Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	24
Tabel 2.4 Rekapitulasi Ratio Tempat Tidur Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	27
Tabel 2.5 Presentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Per kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	29
Tabel 2.6 Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas Per kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	31
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.8 Daftar Etimasi Kasus TBC di Kalimantan Timur Tahun 2020-2029	38
Tabel 2.9 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 2.10 Kinerja Pelayanan (Capaian SPM Provinsi) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	42
Tabel 2.11 Kinerja Pelayanan Capaian SPM Kabupaten/Kota) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.....	44
Tabel 2. 12 Target Dan Capaian Indikator Nasional Mutu (Inm) Tahun 2022 Sd 2024 Uptd Laboratorium Kesehatan Prov. Kaltim	47
Tabel 2. 13 Capaian Kinerja UOBK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	49
Tabel 2. 14 Perumusan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimanta Timur Tahun 2024	60
Tabel 3. 1 Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.....	64

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur periode Tahun 2026 -2030	67
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030	70
Tabel 4.1 Program dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 2029	75
Tabel 4.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pagu Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030	91
Tabel 4.3 Uraian Kegiatan dan Indikator Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2023	80
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	135
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030	140
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:.....	143



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	9
Gambar 2. 2 tren penemuan kasus TBC Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2029..	37
Gambar 2. 3 Data Pelatihan dan Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2025.....	46
Gambar 3. 1 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	Er
	ror! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun perencanaan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah secara terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten dengan perangkat daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, maka Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2025–2029

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan telah menyusun Rencana Strategis di bidang kesehatan sebagai kerangka perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk

mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Renstra ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama lima tahun ke depan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan mengacu pada visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, yaitu “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Visi ini menjadi landasan strategis dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan, dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing tinggi sebagai fondasi menuju terwujudnya Generasi Emas Kalimantan Timur. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sistem kesehatan daerah, serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Renstra Dinas Kesehatan memiliki nilai strategis yaitu Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk menjawab tantangan utama seperti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, penyakit menular dan tidak menular yang belum terkendali, ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, kualitas pelayanan yang belum optimal. Dengan demikian, seluruh kebijakan dan program dalam Renstra ini dirancang agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan, sasaran dan kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini diharapkan menjadi instrumen untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan, pencapaian peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembangunan manusia yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Rencana Strategis dan juga menjadi acuan Rumah Sakit UOBK/UPT yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis Bisnis.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada hasil, serta benar-benar mampu mewujudkan

pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur menuju Generasi Emas 2045.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah 47 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud sebagai acuan strategis dalam pelaksanaan peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menyediakan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan provinsi selama 2025-2029
2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan Kesehatan.
3. Menjadi dasar evaluasi kinerja dinas Kesehatan dalam mencapai target kinerja Kesehatan.
4. Menyelaraskan program dan kegiatan dinas Kesehatan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional.
5. Menjadi pedoman dinas Kesehatan dalam penyusunan Rencana Kerja Kesehatan selama lima tahun kedepan

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menjelaskan gambaran pelayanan yang meliputi tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja Pelayanan (termasuk capaian SPM), menjelaskan kelompok sasaran layanan, mitra dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, Bab ini menjelaskan juga permasalahan, dan isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menyajikan penjelasan mengenai tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Memuat uraian program, kegiatan, subkegiatan, kinerja, indikator, target dan Pagu Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Bab ini juga memuat uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting dan pelaksanaan Rencana Strategis

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi merupakan mandat pokok yang diberikan untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, di mana tugas mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dalam melaksanakan tugas maka terdapat fungsi yang mencakup peran-peran spesifik.

a. Tugas

Tugas Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kepala Dinas kesehatan bertanggung jawab terhadap tugas pokok

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan masyarakat;
- 4) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

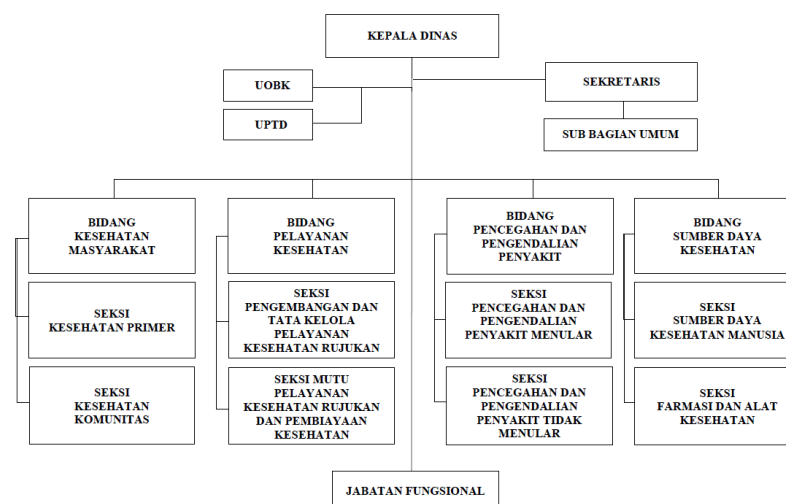
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesehatan Primer dan Komunitas.
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan lanjutan;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penanggulangan penyakit;
- 8) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan;
- 9) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 10) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 11) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- 12) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan pengaturan formal yang menggambarkan bagaimana tugas, kewenangan, dan tanggung jawab dibagi, dikoordinasikan, dan diarahkan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

a. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1 Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahkan
 - a. Subbagian Umum;
- 3) Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Kesehatan Primer; dan
 - b. Seksi Kesehatan Komunitas
- 4) Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengembangan dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - b. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan
- 5) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- 6) Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahkan:
 - a. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
- 7) Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah;
- 8) Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional

b. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok:

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesehatan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;

- 2) Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesehatan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
- 4) pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- 8) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sumber kesehatan
- 9) perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan;
- 10) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 11) pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- 12) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 13) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- 4) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Uraian Tugas

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menghimpun perencanaan program kegiatan dinas dan menyusun perencanaan program sekretariat pada dinas sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku;
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan aset dan barang persediaan;
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan/ sarana prasarana;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian;
- 8) Menyelenggarakan pengelolaan ketatalaksanaan;

- 9) Menyelenggarakan pengelolaan humas dan protokoler;
- 10) Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum
- 11) Penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan advokasi hukum Dinas Kesehatan
- 12) Koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- 13) Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana dan fasilitasi implementasi reformasi birokrasi Dinas Kesehatan;
- 14) Pengelolaan data dan sistem informasi Dinas Kesehatan;
- 15) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 16) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Tugas:

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya Kesehatan Masyarakat berdasarkan siklus hidup, Kelompok Rentan, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer.

b. Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis, dan pengawasan data di bidang upaya Kesehatan Masyarakat

berdasarkan siklus hidup, Kelompok Rentan, Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi di puskesmas dan jejaring pelayanan kesehatan primer.

- 2) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Uraian Tugas:

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas:

- 1) Menyusun rencana operasional bagian Kesehatan Primer dan Komunitas berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merumuskan rancangan program kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran operasional di lingkungan dinas;
- 6) Menyelenggarakan fasilitasi lintas bidang terhadap pegawai berdasarkan permasalahan program yang dialami untuk mendapatkan hasil kerja di lingkungan dinas;
- 7) Mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi Kesehatan Masyarakat, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi program kerja Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah;

- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan masyarakat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Tugas

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis Bidang Pelayanan Kesehatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Papenyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 3) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Pengembangan dan Tata Kelola Kesehatan Rujukan;
- 4) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan & Pembiayaan Kesehatan;
- 5) pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 6) penyiapan bahan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 7) pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Uraian Tugas

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merumuskan rancangan program kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran operasional pada Bidang Pelayanan Kesehatan.
- 6) Menyelenggarakan fasilitasi lintas bidang berdasarkan permasalahan program yang dialami untuk mendapatkan hasil kerja di lingkungan dinas;
- 7) Mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi pelayanan kesehatan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi program kerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perencanaan yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Tugas:

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

b. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (penyakit menular, surveilans imunisasi, kesehatan lingkungan, wabah/KLB dan penyakit tidak menular),
- 2) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perencanaan program Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (penyakit menular, surveilans imunisasi, kesehatan lingkungan, Wabah/KLB dan penyakit tidak menular),
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (penyakit menular, surveilans imunisasi, kesehatan lingkungan, Wabah/KLB dan penyakit tidak menular),
- 4) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (penyakit menular, surveilans imunisasi, kesehatan lingkungan, Wabah/KLB dan penyakit tidak menular),
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Uraian Tugas:

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merumuskan rancangan program kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran operasional di lingkungan dinas;
- 6) Menyelenggarakan fasilitasi lintas bidang terhadap pegawai berdasarkan permasalahan program yang dialami untuk mendapatkan hasil kerja di lingkungan dinas;
- 7) Mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi pencegahan dan pengendalian penyakit, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi program kerja;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang sumber daya kesehatan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas di atas, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program di bidang sumber daya kesehatan;
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis seksi farmasi dan alat kesehatan;
- 4) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis seksi sumber daya manusia kesehatan;
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kefarmasian;
- 6) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaantugas kepada bawahannya bidang sumber daya manusia kesehatan;
- 7) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi farmasi dan alat kesehatan, seksi sumber daya manusia kesehatan; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Uraian Tugas

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan program kerja Dinas Kesehatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merumuskan rancangan program kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran operasional di lingkungan dinas;
- 6) Menyelenggarakan fasilitasi lintas bidang terhadap pegawai berdasarkan permasalahan program yang dialami untuk mendapatkan hasil kerja di lingkungan dinas;
- 7) Mengendalikan dokumentasi dan layanan informasi sumber daya kesehatan, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi program kerja kesehatan masyarakat di lingkungan Pemerintah;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber daya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan segala bentuk sumber daya yang dimiliki atau dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber daya manusia merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesehatan. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seharusnya sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2. 1 Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berdasarkan Permenkes No. 6 Tahun 2024

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH	KEBUTUHAN BERDASARKAN PERMENKES 6 TH 2024 (PER 100.000 PENDUDUK)	GAP
1	Dokter Umum	2337	2023	314
2	Dokter Spesialis	975	486	489
3	Dokter Gigi	745	566	179
4	Perawat	11113	8092	3021
5	Bidan	5168	5260	-92
6	Perawat Gigi	121	850	-729
7	Apoteker	1773	607	1166
8	Asisten Apoteker	1435	1214	221
9	SKM	1073	728	345
10	Sanitarian	339	809	-470
11	Ahli Gizi	492	728	-236
12	Keterampilan Fisik	382	243	139
13	Keteknisian Medis	853	728	125

Sumber data: SISDMK Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, sektor tenaga kesehatan menunjukkan kekurangan besar dalam beberapa jenis tenaga, terutama pada perawat, bidan, dan dokter umum. Beberapa profesi, seperti asisten apoteker, memiliki kelebihan tenaga, sementara profesi lainnya memiliki gap signifikan yang memerlukan peningkatan untuk memenuhi standar peraturan yang berlaku pada tahun 2024.

Rasio Dokter Spesialis sebesar 23 per 100 ribu penduduk melebihi dari target rasio sebesar 12 per 100 ribu penduduk, namun capaian di Tingkat kabupaten baru mencapai 70% atau 7 dari 10 kabupaten terpenuhi rasio dokter spesialisnya masih ada 3 kabupaten yang belum terpenuhi rasio dokter spesialisnya. Hal ini dapat terjadi karena penyebaran tenaga dokter spesialis yang tidak merata, sebanyak 64% sebaran tenaga dokter spesialis berada di Kota Samarinda dan Balikpapan. Hanya tenaga apoteker yang rasionya sudah terpenuhi di seluruh kabupaten/Kota.

Berdasarkan data SISDMK periode Agustus 2025, jumlah tenaga Kesehatan tercatat sebanyak 26.792 dengan jumlah tenaga Kesehatan terbanyak adalah tenaga perawat dan bidan. Sebaran tenaga kesehatan terbanyak ada di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yaitu sebanyak 43%, sedangkan Tenaga Dokter Spesialis yang berjumlah 975 sebanyak 623 atau 64% juga berada di kota Samarinda dan Balikpapan.

Tabel 2. 2 Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah SDM	Rasio	
			Target Nasional Rasio per 100 ribu Penduduk	Rasio Provinsi
1	Sp. Anak	98	2,4	2,3
2	Sp. PD	104	3	2,4
3	Sp. Obsgyn	94	2	2
4	Sp. Bedah	62	2	1
5	Sp. Anestesi	78	2	2
6	Sp. Patologi klinik	45	1	1
7	Sp. Radiologi	40	2	1
8	Sp. Patologi Anatomi	20	1	0,5
9	Sp. BTKV	5	0,2	0,1
10	Sp. Paru	30	1,3	0,7
11	Sp. Urologi	13	0,37	0,3
12	Sp. Saraf	46	1	1
13	Sp. Bedah Saraf	11	0,22	0,25
14	Sp. Jantung	35	1	1

Sumber data: SISDMK Tahun 2025

Dari table 2.2, diketahui bahwa dokter spesialis yang telah memenuhi rasio per 100 ribu penduduk adalah dokter spesialis obgyn, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis saraf, dokter spesialis bedah syaraf, dan dokter spesialis jantung. Adapun dokter spesialis yang belum memenuhi rasio per 100 penduduk adalah dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah, dokter spesialis patologi anatomi, dokter spesialis BTKV, dokter spesialis Paru, dokter spesialis Radiologi, dokter spesialis Urologi. Jika dilihat dari pemenuhan 7 dokter spesialis (4 spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang) maka masih terdapat 4 dokter spesialis (Spesialis Anak, Spesialis penyakit Dalam, Spesialis Bedah, spesialis Radiologi) yang belum memenuhi rasio per 100 ribu penduduk.

Pada tahun 2026-2027 akan dibangun 2 Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi di Kabupaten Kota. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kebutuhan dokter spesialis , jika proyeksi jumlah penduduk Kaltim sampai 2030 sebesar 5.197.920 jiwa berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung sarana dan prasarana yang tersedia sebagaimana pada tabel 2.3 berikut:



Tabel 2. 3 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

NO	FASILITAS KESEHATAN	KEPEMILIKAN/PENGELOLA							JUMLAH
		KEMENKES	PEM PROV	KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	ORG KEMASY	
Rumah Sakit									
1	Rumah sakit	1	3	19	4	1	21	4	53
	Jumlah Tempat Tidur	14	1.184	2.420	372	280	1.767	351	6.388
2	Rumah Sakit Khusus	0	2	1	0	0	8	1	11
	Jumlah Tempat Tidur	0	219	41	0	0	239	38	537
Puskesmas dan Jaringannya									
1	Puskesmas Rawat Inap	0	0	88	0	0	0	0	88
	Jumlah Tempat Tidur	0	0	492	0	0	0	0	492
2	Puskesmas Non Rawat Inap	0	0	100	0	0	0	0	100
3	Puskesmas Keliling	0	0	154	0	0	0	0	154
4	Puskesmas Pembantu	0	0	602	0	0	0	0	602
Sarana Pelayanan Lain									
1	Klinik Pratama	0	0	4	27	7	311	0	349
2	Klinik Utama	0	0	0	0	0	28	0	38
3	Tempat Praktek Mandiri Dokter	0	0	36	0	0	277	0	313
4	Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi	0	0	10	0	0	195	0	205
5	Tempat Praktek Mandiri Dokter Spesialis	0	0	3	0	0	60	0	63
6	Tempat Praktek Mandiri Bidan	0	0	24	0	0	196	0	220
7	Tempat Praktek Mandiri Perawat	0	0	0	0	0	42	0	42
8	Griya Sehat	0	0	1	0	0	0	0	1

NO	FASILITAS KESEHATAN	KEPEMILIKAN/PENGELOLA							JUMLAH
		KEMENKES	PEM PROV	KAB/KOTA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	ORG KEMASY	
9	Panti Sehat	0	0	2	0	0	0	0	2
10	Unit Transfusi Darah	0	0	4	0	0	2	4	10
11	Laboratorium Kesehatan	0	1	6	0	0	0	0	7
Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian									
1	Industri Farmasi	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Obat Tradisioanal /Ekstrak Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Usaha Kecil/Micro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)	0	0	0	0	0	8	0	8
4	Produksi Alat Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0	12	0	12
6	Industri Kosmetika	0	0	0	0	0	1	0	1
7	Perdagangan Besar Farmasi (PBF)	0	0	0	0	4	49	0	53
8	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	0	0	0	0	0	93	0	93
9	Apotik	0	0	0	0	60	1075	0	1135
10	Toko Obat	0	0	0	0	0	65	0	65
11	Toko Alkes	0	0	0	0	0	209	0	209

Sumber data: Program Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.3 menggambarkan jumlah dan distribusi fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, diklasifikasikan berdasarkan jenisnya (Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Polindes/Poskesdes dan Apotik) serta pemilik atau pengelola (Kemenkes, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan) yang berhubungan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Data diatas menunjukkan adanya pembagian peran yang sangat jelas :

1. Pemerintah Kab/Kota mempunyai kendali penuh atas layanan kesehatan primer melalui jaringan puskesmas dan mempunyai Rumah Sakit terbanyak kedua setelah sektor swasta
2. Sektor swasta mendominasi hampir semua jenis fasilitas kesehatan dari mulai Rumah Sakit, layanan kesehatan primer dalam hal ini klinik sampai rantai pasok farmasi yaitu Apotek
3. Kemenkes dan Pemerintah Provinsi memiliki peran yang sangat kecil dalam kepemilikan dan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan terutama Rumah sakit. Hal ini dapat menjadi kegagalan sistem kesehatan bila terjadi masalah dalam pengelolaan Rumah Sakit milik swasta.

Terdapat beberapa point penting dari data diatas dalam hal kepemilikan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu terdapat dominasi sektor swasta, dimana dari total 53 Rumah sakit terdapat 21 diantaranya dimiliki oleh sektor swasta. Demikian pula dengan Klinik terdapat 311 dari 352 Klinik Pratama merupakan milik sector swasta. Data diatas juga menunjukkan bahwa 1.075 dari 1.135 Apotek merupakan milik swasta.

Beberapa tantangan dan peluang yang membutuhkan respons kebijakan, antara lain:

1. Penguatan regulasi dan pengawasan, pemerintah provinsi Kalimantan Timur perlu memastikan implemetasi regulasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kualitas dan mutu layanan yang merata terutama di wilayah terpencil.
2. Peningkatan investasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota. Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi

dalam pembangunan dan pengelolaan Rumah Sakit melalui peningkatan Sarana, Prasarana, alat Kesehatan maupun Sumber daya manusia kesehatan. Ketergantungan yang tinggi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta dapat menjadi masalah bila terjadi penutupan Rumah Sakit milik swasta karena suatu hal.

3. Pemerintah perlu memperkuat layanan primer (Puskesmas) melalui peningkatan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan agar Puskesmas tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
4. Revitalisasi Pustu dan Polindes menjadi penting agar masyarakat desa tidak bergantung pada akses ke RS yang jauh.
5. Perencanaan pembangunan fasilitas kesehatan harus berbasis analisis kebutuhan wilayah (urban–rural, kepulauan, daerah terpencil).

Dengan kata lain, tantangan utama bukan sekadar menambah jumlah fasilitas, tetapi memastikan distribusi merata dan memperkuat lini depan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Ratio Tempat Tidur Rumah Sakit Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Tahun	Total Tempat Tidur	Jumlah Penduduk	Ratio Daya Tampung
1	2020	6696	3.766.039	1,77
2	2021	6236	3.803.470	1,63
3	2022	6720	3.838.760	1,75
4	2023	6962	3.909.740	1,78
5	2024	7193	3.914.766	1,76

Sumber data: Program Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 dapat diketahui jumlah total tempat tidur (TT) rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk serta dihitung rasio daya tampung. Tujuannya adalah untuk mengetahui kecukupan ketersediaan tempat tidur RS terhadap kebutuhan penduduk, sehingga bisa menjadi indikator perencanaan layanan kesehatan.

Rasio daya tampung Rumah Sakit secara nasional adalah 1 TT/1000 penduduk, sedangkan menurut WHO adalah 3 TT/1000 penduduk. Kalimantan Timur dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2025 mempunyai rerata rasio 1,7 artinya tersedia 1,7 TT/1000 penduduk sehingga memenuhi ketentuan secara

nasional namun masih sangat jauh bila dibandingkan dengan rasio daya tampung yang ditentukan secara internasional (WHO). Tingkat ketersediaan TT juga tidak merata antar daerah, masih terdapat 2 (dua) kabupaten yang mempunyai rasio daya tampung kurang dari 1 TT/1000 penduduk, yaitu Kab. Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara dengan rerata rasio daya tampung 0,8. Hal ini dapat berakibat tingginya BOR (Bed Occupancy Rate), antrian rawat inap, potensi keterlambatan layanan serta bila terjadi lonjakan kasus seperti kejadian luar biasa atau pandemi (contoh: pandemic COVID-19) maka kapasitas daya tampung sangat rentan kewalahan.

Kebijakan strategis perlu dilakukan yang berimplikasi pada pemenuhan TT Rumah Sakit antara lain:

1. Prioritas pembangunan Rumah Sakit baru atau perluasan kapasitas TT Rumah Sakit terutama di daerah dengan defisit TT tinggi.
2. Optimalisasi distribusi TT agar tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan.
3. Perlu adanya sinkronisasi dengan perencanaan demografi: daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi harus diproyeksikan kebutuhan TT sejak dini.
4. Kolaborasi dengan RS swasta bisa dipertimbangkan untuk menutup gap daya tampung.
5. Optimalisasi sistem rujukan agar layanan kesehatan tetap terjamin

Kebijakan penguatan layanan primer (puskesmas, klinik) juga penting untuk mengurangi beban rawat inap di Rumah Sakit.

Tabel 2. 5 Presentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit Per kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

NO	KAB/KOTA	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
		Jumlah RS	SPA (>60%)	SPA (<60%)	Jumlah RS	SPA (>60%)	SPA (<60%)	Jumlah RS	SPA (>60%)	SPA (<60%)	Jumlah RS	SPA (>60%)	SPA (<60%)	Jumlah RS	SPA (>60%)	SPA (<60%)	Jumlah RS	SPA (>60%)	SPA (<60%)
1	Kota Samarinda	16	13	3	17	10	7	16	13	3	16	14	2	15	14	1	16	14	2
2	Kota Balikpapan	15	13	2	16	9	7	15	10	5	15	11	4	15	14	1	16	13	3
3	Kota Bontang	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	4	1
4	Kab. Kutai Kartanegara	3	2	1	3	2	1	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0
5	Kab. Kutai Barat	1	1	0	2	1	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	3	0
6	Kab. Kutai Timur	10	5	5	9	1	8	8	5	3	8	7	1	10	8	2	10	9	1
7	Kab. Paser	3	2	1	2	1	1	1	1	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0
8	Kab. Penajam Paser Utara	1	1	0	1	1	0	2	1	1	2	1	1	3	2	1	5	4	1
9	Kab. Berau	2	1	1	2	1	1	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	2	0
10	Kab. Mahakam Ulu	2	0	2	2	0	2	2	1	1	2	1	1	2	2	0	2	0	2
TOTAL		58	43	15	59	31	28	57	41	16	58	48	10	60	54	6	64	54	10

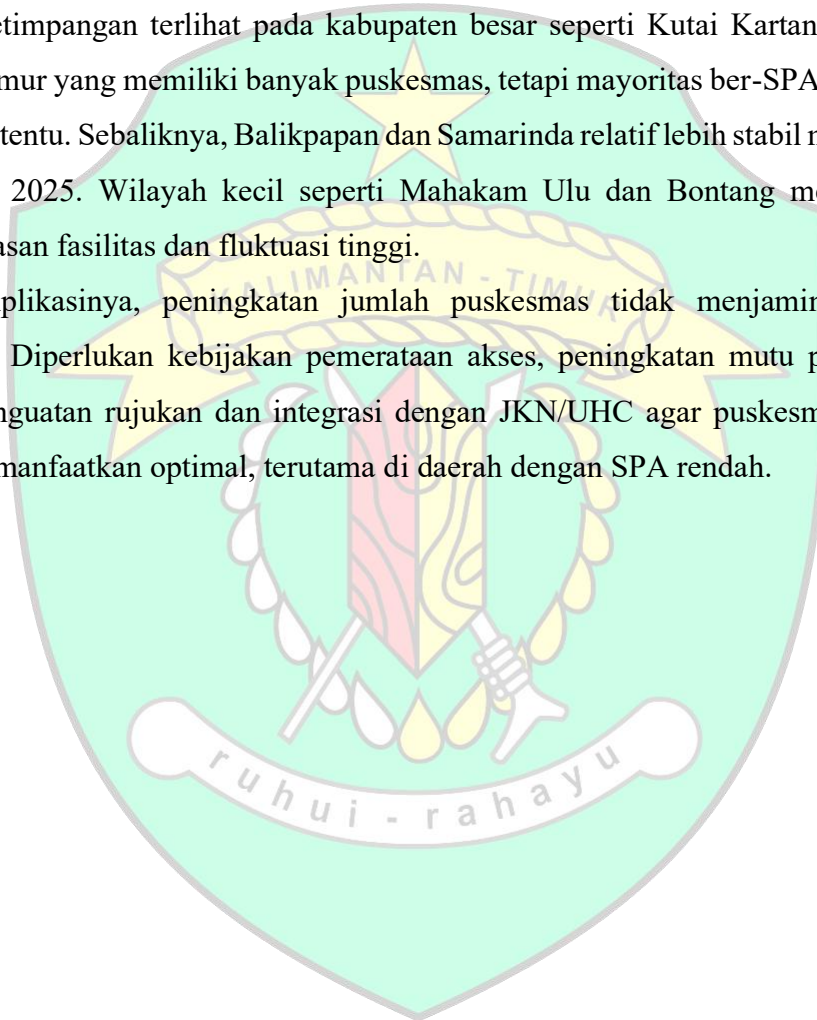
Sumber Data: Program Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2024



Berdasarkan tabel 2.5 dapat diketahui kondisi puskesmas di Kalimantan Timur tahun 2020–2025 berdasarkan ketersediaan rawat inap dan tingkat pemanfaatan tempat tidur (SPA). Jumlah puskesmas tetap 188 unit, dengan 104 memiliki rawat inap, namun pemanfaatannya berfluktuasi tajam. Pada 2020 terdapat 48 puskesmas dengan SPA >60%, turun menjadi 39 pada 2021, melonjak drastis menjadi 175 pada 2024, lalu anjlok kembali pada 2025 dengan hanya 31 puskesmas optimal dan 157 puskesmas <60%.

Ketimpangan terlihat pada kabupaten besar seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur yang memiliki banyak puskesmas, tetapi mayoritas ber-SPA rendah di tahun tertentu. Sebaliknya, Balikpapan dan Samarinda relatif lebih stabil meski juga turun di 2025. Wilayah kecil seperti Mahakam Ulu dan Bontang menghadapi keterbatasan fasilitas dan fluktuasi tinggi.

Implikasinya, peningkatan jumlah puskesmas tidak menjamin utilisasi layanan. Diperlukan kebijakan pemerataan akses, peningkatan mutu pelayanan, serta penguatan rujukan dan integrasi dengan JKN/UHC agar puskesmas benar-benar dimanfaatkan optimal, terutama di daerah dengan SPA rendah.



Tabel 2. 6 Persentase Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas Per kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

N O	KAB/KOTA	Jumlah Puskesmas	RANAP	NON RANAP	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					SPA (>60%)	SPA (<60%)	SPA (>60%)	SPA (<60%)	SPA (>60%)	SPA (<60%)	SPA (>60%)	SPA (<60%)	SPA (>60%)	SPA (<60%)	SPA (>60%)	SPA (<60%)
1	PASIR	19	9	10	18	1	9	1	19	0	19	0	19	0	2	17
2	KUBAR	19	12	7	13	1	13	0	19	0	19	0	18	1	0	19
3	KUKAR	32	13	9	5	10	5	5	25	7	25	7	32	0	12	20
4	KUTIM	21	23	3	2	11	2	10	11	10	8	13	21	0	5	16
5	BERAU	21	18	11	1	14	1	7	16	5	13	8	17	4	0	21
6	PENAJAM	11	10	2	5	5	5	0	11	0	11	0	9	2	0	11
7	MAHULU	6	6	1	2	0	2	0	6	0	5	1	5	1	0	6
8	BALIKPAPAN	27	7	20	1	1	1	0	26	1	27	0	27	0	3	24
9	SAMARINDA	26	6	20	1	1	1	1	25	1	26	0	26	0	8	18
10	BONTANG	6	0	6	0	0	0	0	6	0	6	0	1	5	1	5
TOTAL		188	104	89	48	44	39	24	164	24	159	29	175	13	31	157

Sumber Data: Program Bidang Pelayanan Kesehatan Provinsi Kesehatan Kalimantan Timur Tahun 2024



Berdasarkan tabel 2.6 diketahui distribusi puskesmas di Kalimantan Timur menurut ketersediaan rawat inap (RANAP) dan non-rawat inap, serta capaian tingkat pemanfaatan tempat tidur (SPA) dari tahun 2020–2025. Dari total 188 puskesmas, sebanyak 104 memiliki fasilitas rawat inap dan 89 non-rawat inap, dengan pola pemanfaatan yang sangat berfluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat 48 puskesmas dengan SPA >60%, tetapi angka ini menurun drastis pada 2021 menjadi hanya 39 puskesmas, sebelum melonjak tajam pada 2022–2024 (164–175 puskesmas). Namun, pada 2025 terjadi penurunan signifikan, di mana hanya tersisa 31 puskesmas dengan SPA optimal sementara 157 puskesmas kembali berada pada kategori <60%.

Ketimpangan terlihat jelas antarwilayah. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) memiliki jumlah puskesmas relatif besar (32 dan 21 unit), tetapi pada tahun-tahun tertentu mayoritas puskesmas justru menunjukkan pemanfaatan rendah, misalnya Kukar pada 2025 dengan 20 puskesmas SPA <60%. Sebaliknya, daerah seperti Balikpapan dan Samarinda meski memiliki jumlah puskesmas cukup banyak, cenderung lebih stabil dalam mempertahankan pemanfaatan tinggi pada 2022–2024, tetapi juga mengalami penurunan pada 2025. Beberapa wilayah kecil seperti Mahakam Ulu dan Bontang menghadapi keterbatasan jumlah puskesmas, dengan fluktuasi tajam pada capaian SPA yang menunjukkan kerentanan dalam pelayanan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya strategi penguatan manajemen pelayanan puskesmas, terutama pada aspek distribusi pasien, mutu layanan, dan perencanaan kapasitas. Fluktuasi pemanfaatan menunjukkan bahwa peningkatan jumlah puskesmas tidak otomatis menjamin peningkatan akses dan utilisasi. Pemerintah daerah perlu meninjau kembali pola rujukan, keterpaduan dengan rumah sakit, serta penguatan program JKN dan UHC agar pemanfaatan layanan lebih merata. Selain itu, kabupaten dengan jumlah puskesmas banyak tetapi utilisasi rendah seperti Kutai Kartanegara dan Kutai Timur harus menjadi prioritas pembinaan, sementara daerah dengan keterbatasan fasilitas seperti Mahakam Ulu memerlukan intervensi untuk memperluas akses dasar. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya

fokus pada kuantitas puskesmas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan pemanfaatannya oleh masyarakat.

2.1.2.3 Pengadaan Obat Program terhadap Usulan Rencana Obat Program

1. Pengadaan Obat Program Malaria

Pengelolaan kefarmasian di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur salah satunya pengelolaan obat program nasional yang setiap tahun nya diwajibkan pengusulannya melalui aplikasi *emonevkatalogobat*. Usulan rencana obat program ini dilaksanakan secara berjenjang dari semua kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur. Usulan obat program ini melibatkan semua pengelola program dan pengelola kefarmasian di kabupaten/kota dan provinsi, pengelola program sebagai pemegang data sasaran yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan usulan obat untuk satu tahun berdasarkan form excel dan dan rumus yang telah disiapkan dalam aplikasi, pengelola kefarmasian sebagai pemilik akun aplikasi dan sebagai pemegang data sisa stok obat yang ada di instalasi farmasi yang nantinya digunakan dalam pertimbangan dalam perhitungan usulan obat program. Keterlibatan pengelola program dan pengelola kefarmasian sangat penting dalam perhitungan kebutuhan obat untuk satu tahun karena saling keterkaitan. Dimana obat tersebut nantinya akan di kelola oleh kefarmasian meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan pendistribusian dan pelaporannya di instalasi farmasi kabupaten/kota/provinsi, tetapi untuk dasar pendistribusian melalui alokasi pengelola program.

Semua obat malaria didapatkan dari APBN tidak dilakukan pengadaan menggunakan anggaran APBD, Realisasi penerimaan DHP dispersible mencapai 100%, sedangkan obat yang lainnya penerimaannya dibawah 100%. Realisasi pendistribusian sesuai alokasi program untuk primakuain tablet mencapai 100%, sedangkan obat yang lainnya dibawah 100%. Pendistribusian obat ke kab/kota dengan berdasarkan alokasi dari program.

2. Pengadaan Obat Program Tuberkulosis

Pengelolaan kefarmasian di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur salah satunya pengelolaan obat program nasional yang setiap tahun nya diwajibkan pengusulannya melalui aplikasi *emonevkatalogobat*. Usulan rencana obat program ini

dilaksanakan secara berjenjang dari semua kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Timur. Usulan obat program ini melibatkan semua pengelola program dan pengelola kefarmasian di kabupaten/kota dan provinsi, pengelola program sebagai pemegang data sasaran yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan usulan obat untuk satu tahun berdasarkan form excel dan rumus yang telah disiapkan dalam aplikasi, pengelola kefarmasian sebagai pemilik akun aplikasi dan sebagai pemegang data sisa stok obat yang ada di instalasi farmasi yang nantinya digunakan dalam pertimbangan dalam perhitungan usulan obat program. Dimana obat tersebut nantinya akan di kelola oleh kefarmasian meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan pendistribusian dan pelaporannya di instalasi farmasi kabupaten/kota/provinsi, tetapi untuk dasar pendistribusian melalui alokasi pengelola program.

Semua obat tuberkulosis didapatkan dari APBN tidak dilakukan pengadaan menggunakan anggaran APBD. Realisasi penerimaan OAT KDT Dosis harian mencapai lebih dari 100%, sedangkan obat yang lainnya penerimaannya dibawah 100%. Realisasi pendistribusian sesuai alokasi program untuk OAT kombipak kategori 1 mencapai 100%, sedangkan obat yang lainnya dibawah 100%. Pendistribusian obat ke kab/kota dengan berdasarkan alokasi dari program.

2.1.3 Capaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan merupakan cerminan dari komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berserta Unit Pelayanan Teknis (UPTD) nya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat

2.1.3.1 Capaian Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan adalah ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mencapai target strategisnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). IKU ini ditentukan berdasarkan kebijakan nasional (RPJMN, Renstra Kementerian Kesehatan) serta prioritas daerah (RPJMD, Renstra SKPD).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tab21 berikut:

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Usia Harapan Hidup	Persen	73.72	74.33	74.45	74.61	74.6	74.62	74.75	74.72	74.82	74.94
2	Jumlah kasus kematian ibu	Orang	85	92	80	168	75	73	70	83	63	74
3	Jumlah kematian bayi	Orang	590	662	580	702	570	540	484	606	392	589
4	Jumlah kematian Balita	Orang	75	69	70	53	65	72	60	31	65	49
5	Prevalensi balita <i>Sunting</i>	Persen	27	N/A	26.5	22.8	26	23.9	25.5	22.9	25	22.2
6	Presentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Persen	65	88.29	70	91.09	75	91.09	80	94.3	N/A	N/A
7	Jumlah temuan kasus TBC/Case Detection Rate (CDR)	Persen	55	47	60	36.07	65	51	70	65.4	N/A	N/A
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan fasilitas kesehatan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	87	87.2
9	Indeks pencapaian SPM Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persen	68	70	70.33	70.3	70.5	70.73	70.65	73.2	71.53	68.62
11	Indeks kepuasan masyarakat daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87	88.8

Sumber Data: Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024

1. Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan masyarakat merupakan indikator penting pembangunan daerah. Analisis terhadap pelayanan ibu hamil, ibu nifas, kematian ibu dan bayi, serta status gizi balita diperlukan untuk menilai efektivitas program kesehatan dan arah kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur.

a. Kondisi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan antenatal care (ANC) menunjukkan capaian yang berfluktuasi. Tahun 2020–2021, cakupan K1 mencapai target (100%), namun K4 dan K6 menurun akibat pandemi COVID-19 dan belum kembali mencapai target pada 2024. Hal ini menyebabkan sebagian ibu hamil tidak terskrining risiko seperti anemia dan KEK (Kekurangan Energi Kronis), yang meningkatkan risiko BBLR, prematur, serta kematian ibu dan bayi.

Angka kematian ibu (AKI) sempat meningkat pada 2021 (168 kasus) lalu menurun hingga 74 kasus pada 2024, namun masih menjadi perhatian. Penyebab utama adalah perdarahan (19 kasus), sebagian besar terjadi pada masa nifas (38 kasus), dengan kasus tertinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Pelayanan ibu nifas juga menurun, di mana persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih turun dari 93,84% (2023) menjadi 73,56% (2024), dan pemberian vitamin A pasca persalinan turun dari 99,9% menjadi 78,6%.

b. Kematian Bayi dan Status Gizi Ibu

Kematian bayi menurun dari 606 bayi (2023) menjadi 549 bayi (2024), namun masih di atas target (547). Penyebab utama bergeser dari BBLR dan asfiksia ke gangguan pernapasan dan kardiovaskular (41,3%). Jumlah ibu hamil dengan KEK meningkat dari 5.348 (2023) menjadi 5.948 (2024), dan anemia dari 7.510 menjadi 7.584, yang berkontribusi terhadap peningkatan bayi BBLR (3.771 bayi, naik 0,65%).

c. Status Gizi Balita

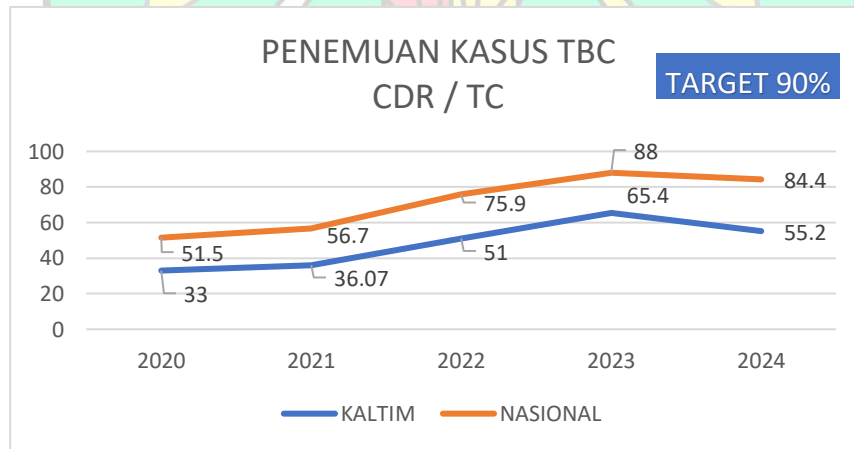
Tren stunting menunjukkan penurunan dari 28,3% (2020) menjadi 22,2% (2024, SSGI), namun belum mencapai target 21,3% dan masih di atas

target nasional (<14%). Indikator wasting mencapai 10,1% (target 7,6%) dan mulai dimasukkan dalam pemantauan resmi pada 2024, menandai perluasan fokus pembangunan gizi daerah. Faktor yang memengaruhi status gizi anak meliputi status gizi ibu, jarak kelahiran, kondisi sanitasi, ekonomi rumah tangga, dan akses air bersih.

d. Kunjungan Posyandu dan Pemantauan Balita

Dari 4.860 Posyandu yang ada, kunjungan balita meningkat selama 2020–2024 namun masih di bawah target 90%. Lima kabupaten/kota dengan kunjungan terendah adalah Kutai Timur (28,15%), Samarinda (33,15%), Berau (38%), Balikpapan (43,96%), dan Kutai Barat (47,61%). Rendahnya kunjungan mengindikasikan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemantauan pertumbuhan anak.

2. Penyakit TBC



Gambar 2. 2 tren penemuan kasus TBC Provinsi Kalimantan

Cakupan kasus TBC yang ditemukan dan diobati (Case Detection Rate) di Provinsi Kaltim di tahun 2021 sebesar 36,07 % dan terus mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 51 % hingga di tahun 2023 menjadi 65,4%, dan kemudian terjadi penurunan capaian di tahun 2025 menjadi 55,2%.

Tabel 2. 8 Daftar Etimasi Kasus TBC di Kalimantan Timur Tahun 2020-2029

TBC	2020	2021	2022	2023	2024
Estimasi Kasus	14,459	14,459	16,573	15,369	21,867
Kasus Ditemukan	4,282	5,310	8,075	11,740	12,778

Sumber data: program bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024

Walaupun jumlah kasus yang ditemukan meningkat dari tahun sebelumnya namun dikarenakan adanya peningkatan target temuan yang semula di tahun 2023 sebesar 15.369 menjadi 21.687 di tahun 2024 sehingga prosentase cakupan penemuan kasus menjadi menurun. Dibandingkan dengan capaian nasional, capaian Provinsi Kalimantan Timur masih dibawah, dan belum memenuhi target 90%.

Peningkatan temuan kasus TBC di Kaltim significant meningkat sejak mulai tahun 2022 dikarenakan mulai di jalankannya program penguatan jejaring TBC di wilayah / District Public Private Mix (DPPM) dengan meningkatkan perlibatan faskes swasta dan melakukan pelaporan wajib SITB. Peningkatan penemuan kasus tidak lepas dari ketersediaan sarana diagnosis cepat TBC dengan pendukung laboratorium tes cepat molekuler TBC / TCM di Provinsi Kaltim dimana di Tahun 2024 telah mengadakan sebanyak 11 unit yang telah ditempatkan di fasnyakes kabupaten/ kota

2.1.3.2 Capaian Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Indikator Kinerja kunci (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis atau tujuan organisasi.

Tabel 2. 9 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di provinsi	persen	1	1.78	1	1.64	1	1.75	1	1.78	1.86	1.83
2	Persentase Balita Wasting	persen	9	N/A	8.5	8.1	8	9.1	7.5	10.1	7	10.1
3	Persentase Balita Underweight	persen	16	N/A	15	16.2	14	20.4	13	18	12	18.3
4	Persentase pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	persen	58	55.7	59	50	60	60.5	61	82	N/A	N/A
5	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	persen	60	56.86	75	28.3	90	63.72	100	88.6	100	93.4
6	Persentase Penderita Diabetes Miletus yang mendapat layanan sesuai standar	persen	60	70	75	68.6	90	94.4	100	97.3	30	43
7	Persentase keberhasilan pengobatan Tuberculose (TBC)/Success Rate (SR)	persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90	86

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
8	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	persen	84	91.95	86	93.32	88	85.98	90	93	92	95
9	Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas	persen	98.5	95.66	99	99.2	99.5	98.2	100	98.4	100	100
10	Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga Kesehatan	persen	70	100	80	100	90	100	100	100	100	100
11	Persentase Puskesmas Terakreditasi Minimal Utama	persen	43	23.4	64	23.4	96	23.4	100	85.11	100	100

Sumber Data: Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024

2.1.3.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi memiliki 2 indikator, yang pertama Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan yang kedua Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (Keracunan Makanan, Difteri, Malaria dan DBD)

Kinerja pelayanan (capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi) di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 10 Kinerja Pelayanan (Capaian SPM Provinsi) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100 (27.075)	100 (27.075)	100 (205.840)	100 (205.840)	100 (56.111)	100 (56.111)	100 (105)	100 (105)	100 409.980	100 409.980
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (Keracunan Makanan, Diptheri, Malaria dan DBD)	Persen	100 (27.075)	100 (27.075)	100 (205.840)	100 (205.840)	100 (56.111)	100 (56.111)	100 (216)	100 (216)	100 (185)	100 (185)

Bedasarkan tabel 2.4, diketahui bahwa capaian kinerja pelayanan (SPM Provinsi) sebesar 100%, yang artinya bahwa seluruh target sasaran telah menerima layanan sesuai standar yang ditetapkan.

2.1.3.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota memiliki 12 indikator yang diatur oleh pemerintah pusat dan harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan kesehatan dasar.

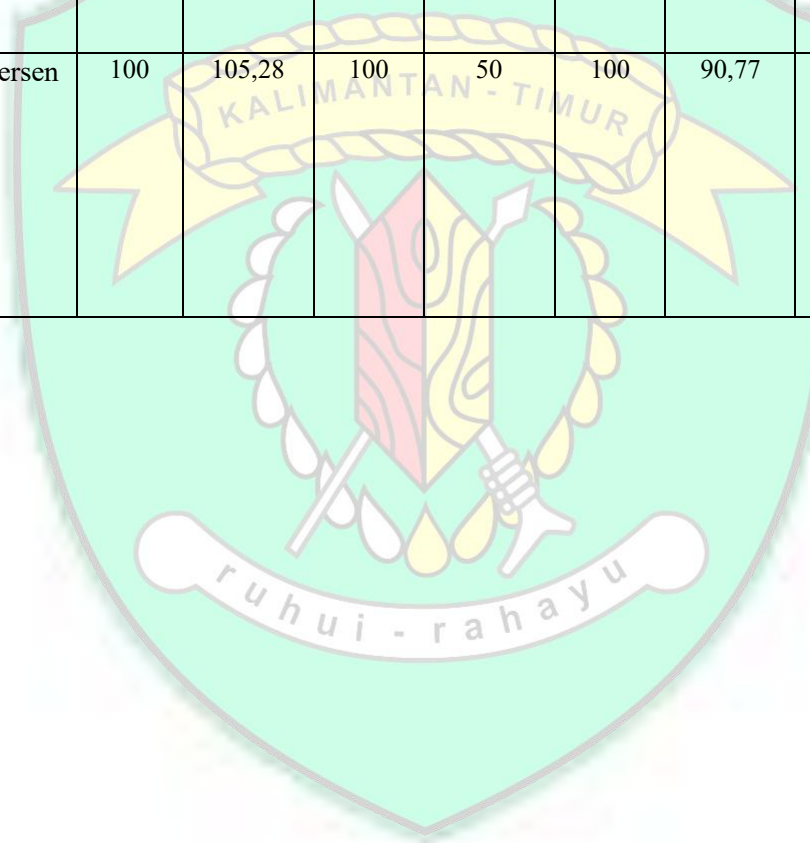
Kinerja pelayanan (capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab/Kota) di bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2. 11 Kinerja Pelayanan Capaian SPM Kabupaten/Kota) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	84,3	100	89,7	100	89,93	100	77,63	100	81,56
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	93,0	100	97,2	100	93,33	100	93,99	100	97,09
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	92,8	100	89	100	92,58	100	94,36	100	97,89
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	42,9	100	57,6	100	73,82	100	79,94	100	88,67
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persen	100	45,6	100	50,6	100	86,31	100	87,57	100	92,62
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persen	100	37,0	100	30,5	100	59,88	100	81,47	100	81,17
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen	100	38,6	100	55,6	100	73,34	100	82,87	100	85,60
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100	27,9	100	29,5	100	64,39	100	88,59	100	93,85
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100	100,93	100	63,5	100	80,76	100	100	100	102
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen	100	98,83	100	85,2	100	97,47	100	98,32	100	94,79

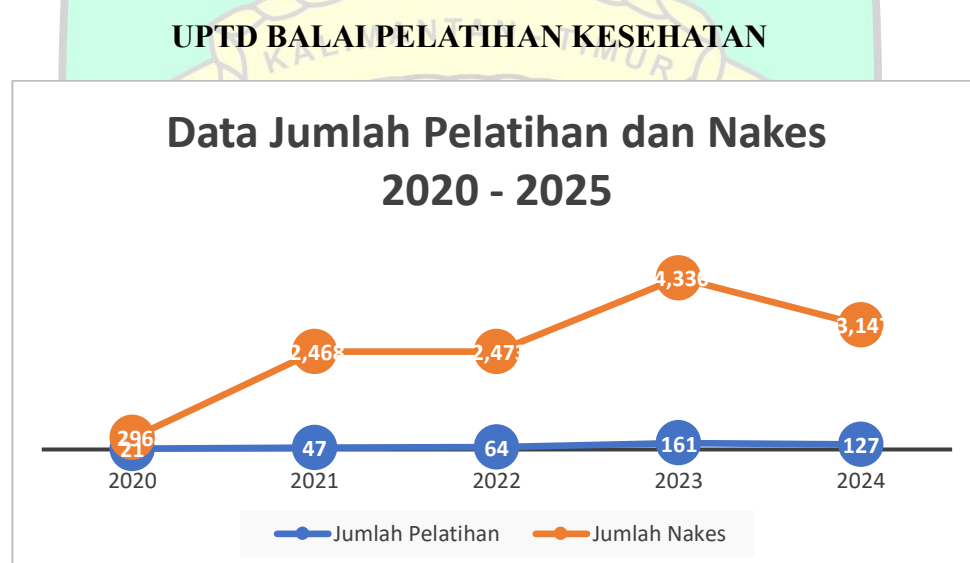
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun									
			2020		2021		2022		2023		2024	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	100	97,40	100	70,27	100	88,35	100	83,92	100	95,85
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100	105,28	100	50	100	90,77	100	84,10	100	104



Berdasarkan tabel 2.14 diketahui bahwa terdapat gap (kesenjangan) capaian kinerja dan target sasaran SPM untuk semua indikator. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan jumlah sasaran proyeksi yang ditetapkan dengan sasaran riil yang ada dalam wilayah masing-masing kabupaten/kota. Selain itu, ketersediaan anggaran yang tidak optimal untuk penyediaan bahan habis pake dan alat kesehatan sehingga tidak bisa menjangkau semua masyarakat untuk diberikan pelayanan sesuai standar. Keterbatasan pemberian pelayanan yang sesuai standar juga disebabkan masih kurangnya rasio tenaga kesehatan di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama baik jumlah maupun kualitas.

2.1.3.5 Capaian Kinerja UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

1. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kalimantan Timur



Gambar 2. 3 Data Pelatihan dan Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2025

Pada Tahun 2020 terjadi pandemi Covid Sehingga pelatihan yang diselenggarakan hanya 21 pelatihan dengan jumlah peserta 296 Orang Setelah Pandemi covid mereda pelatihan Mulai mengalami peningkatan demikian juga jumlah peserta nya (2021 – 2023) Pada tahun 2024 Kegiatan Pelatihan Mengalami penurunan dikarenakan ada nya perubahan kebijakan dalam peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan yaitu bertambahnya Lembaga – Lembaga yang sudah terakreditasi dikalimantan tirmur.

2. Capaian Kinerja UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2. 12 Target Dan Capaian Indikator Nasional Mutu (Inm) Tahun 2022 Sd 2024 UPTD Laboratorium Kesehatan Prov. Kaltim

No	INDIKATOR NASIONAL MUTU (INM)	Target Nasional Tahunan	Capaian Tahun 2022 (%)	Capaian Tahun 2023 (%)	Capaian Tahun 2024 (%)
1	Kepatuhan Identifikasi pasien/sampel/spesimen	100%	97.22	100	100
2	Kepatuhan Kebersihan Tangan (KKT)	85%	90.88	95.82	99.90
3	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%	90.66	98.48	100
4	Kepatuhan Pelaporan Hasil Kritis	100%	0	100	100
5	Kejadian sampel/ spesimen yang hilang	0	6	0	0
6	Pengulangan Hasil Pemeriksaan	0%	0	0.004	0
7	Kepuasan Pengguna Layanan	> 76,60	80.35	84.24	87.08

Sumber data: laporan UPTD Laboratorium Kesehatan Kalimantan Timur tahun 2022-2024

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2022 hingga 2024), capaian terhadap *Indikator Nasional Mutu (INM)* menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten hampir di seluruh aspek. Hal ini mencerminkan adanya komitmen kuat terhadap perbaikan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan pengguna layanan. Salah satu indikator yang menunjukkan kinerja sangat baik adalah Kepatuhan Identifikasi Pasien/Sampel/Spesimen. Capaian meningkat dari 97,22% pada tahun 2022 menjadi 100% di tahun 2023 dan berhasil dipertahankan hingga 2024. Artinya, seluruh prosedur identifikasi telah dilakukan dengan benar, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap Kebersihan Tangan (KKT) juga mengalami tren positif. Dari capaian 90,88% di tahun 2022, naik menjadi 95,82% di tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 99,90% di 2024. Ini menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan budaya keselamatan dan pencegahan infeksi di lingkungan pelayanan. Selanjutnya, Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) turut menunjukkan perbaikan signifikan, dari 90,66% pada tahun 2022 menjadi 98,48% di tahun 2023 dan mencapai 100% pada

tahun 2024. Pencapaian ini menandakan bahwa tenaga kesehatan semakin disiplin dalam penggunaan APD sesuai dengan protokol keselamatan kerja.

Kepatuhan Pelaporan Hasil Kritis merupakan indikator yang mengalami lompatan paling drastis, dari 0% di tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023 dan tetap konsisten di tahun 2024. Hal ini menandakan adanya perbaikan sistemik dalam tata kelola informasi hasil pemeriksaan yang bersifat kritis. Sementara itu, kejadian hilangnya sampel/spesimen, yang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 6 kejadian, berhasil ditekan menjadi 0 sejak tahun 2023. Ini menunjukkan efektivitas sistem manajemen laboratorium dan distribusi spesimen. Pada indikator Pengulangan Hasil Pemeriksaan, tercatat sedikit penyimpangan di tahun 2023 (0,004%), namun secara umum tetap dalam batas nol pada 2022 dan kembali nol pada 2024. Penyimpangan ini bersifat sangat kecil dan kemungkinan besar tidak berdampak signifikan secara klinis. tingkat Kepuasan Pengguna Layanan menunjukkan tren positif dari 80,35% di tahun 2022 menjadi 84,24% di tahun 2023, dan meningkat lagi menjadi 87,08% pada tahun 2024. Capaian ini jauh di atas target nasional sebesar >76,60%, menandakan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna.

Secara umum, seluruh indikator mengalami peningkatan atau berhasil dipertahankan dalam posisi optimal. Beberapa indikator telah mencapai target nasional sejak tahun 2023 dan menunjukkan konsistensi di tahun 2024. Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan manajemen risiko.

Tabel 2. 13 Capaian Kinerja UOBK Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

TAHUN	BOR	ALOS	BTO	TOI	RATA KUNJUNGAN
2019	55.6	4.3	53.5	4.4	345.5
2020	41.4	4.7	37.6	5.5	290.2
2021	41.6	5.4	37.8	9.9	288.1
2022	44.9	3.4	46.9	12.8	178.9
2023	52.6	3.3	55.3	9.7	320.1

Sumber data: laporan UPTD Laboratorium Kesehatan Kalimantan Timur tahun 2022-2024

Selama periode 2019–2023, kinerja pelayanan rumah sakit sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020–2021 akibat pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari turunnya BOR (tingkat keterisian tempat tidur), BTO (perputaran tempat tidur), dan rata-rata kunjungan pasien. Sementara itu, ALOS (lama rawat inap) meningkat, mencerminkan beban kasus yang lebih berat, dan TOI (waktu kosong tempat tidur) juga meningkat, menandakan efisiensi pelayanan menurun.

Memasuki tahun 2022–2023, terjadi tren pemulihan. BOR dan BTO mulai meningkat, ALOS dan TOI menurun, serta jumlah kunjungan pasien kembali naik. Meski demikian, BOR masih di bawah standar ideal WHO (60–85%), dan TOI masih cukup tinggi, menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan tempat tidur belum optimal.

2.1.3.6 Laporan Pengelolaan Keuangan

Tabel 2.14 Laporan Pengelolaan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pagu	Realisasi
1	2020	153,266,838,583.00	123,017,489,586.00
2	2021	202,945,289,806.00	163,657,247,815.00
3	2022	133,688,134,089.00	111,236,636,371.00
4	2023	314,131,508,834.00	268,547,019,444.00
5	2024	428,018,038,700.00	215,114,093,019.00

Sumber Data: Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Realisasi anggaran cenderung bergerak mengikuti pagu, tetapi tingkat fluktuasinya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran tidak hanya bergantung pada besaran pagu, tetapi juga kesiapan pelaksanaan program. Dalam periode 2020–2023, tingkat penyerapan berada pada kisaran 80–85%, menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang stabil dan efektif. Tahun 2024 menunjukkan penurunan drastis menjadi 50,2%, yang dapat mengindikasikan adanya keterlambatan pelaksanaan program, dan kegiatan yang masih berjalan dan belum terealisasi penuh pada waktu laporan dibuat

Pertumbuhan Anggaran Signifikan mulai 2023, menunjukkan ekspansi program yang besar dan peningkatan kapasitas anggaran. Hal ini menuntut peningkatan pengendalian internal serta manajemen kegiatan agar setara dengan besarnya pagu. Realisasi yang fluktuatif mengindikasikan perlunya konsistensi perencanaan dan evaluasi triwulan/bulanan untuk menjaga stabilitas penyerapan.

Penurunan serapan harus menjadi perhatian utama. Perlu identifikasi spesifik terkait program/kegiatan yang tidak berjalan, hambatan administratif, atau faktor eksternal seperti regulasi atau keterlambatan pengadaan. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di tahun mendatang, disarankan:

1. Memperkuat perencanaan anggaran berbasis kinerja sehingga pagu yang ditetapkan lebih selaras dengan kapasitas pelaksanaan.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendeteksi keterlambatan serapan sejak awal.
3. Optimasi proses pengadaan dan administrasi keuangan, terutama pada tahun dengan pagu yang meningkat signifikan.
4. Menyesuaikan skala dan prioritas program pada tahun dengan lonjakan pagu agar pelaksanaan tidak terganggu oleh keterbatasan sumber daya.
5. Melakukan review mendalam terhadap kinerja 2024 untuk menemukan akar penyebab rendahnya penyerapan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Pelayanan difokuskan pada pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pengawasan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Dinas Sosial

Masyarakat kelompok rentan (anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan), pelayanan kesehatan darurat saat bencana, dukungan rehabilitasi untuk ODGJ, perluasan jaminan kesehatan sosial (PBI JKN).

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Masyarakat yang terdampak bencana (banjir, tanah longsor, kebakaran), termasuk pelayanan kesehatan darurat dengan system cluster, pos kesehatan lapangan, dan pengendalian wabah pasca-bencana.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama

Anak usia sekolah dalam bentuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang terdiri dari:

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pendidikan Kesehatan
- c. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Sehat

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Integrasi data kependudukan untuk:

- a. Menentukan sasaran pelayanan kesehatan (misal, ibu hamil, bayi baru lahir, balita).
- b. Mempercepat penerbitan dokumen (KIA, akta lahir) sebagai syarat kepesertaan JKN dan program kesehatan.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

7. Dinas Pemuda dan Olahraga

Sasaran Dinas Kesehatan di Dinas Pemuda dan Olahraga adalah pemuda di Provinsi Kalimantan Timur.

8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Pekerja yang memerlukan pelayanan Kesehatan kerja

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Sasaran Dinas Kesehatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) adalah ibu, anak, dan korban kekerasan,

10. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

11. Sasaran Dinas Kesehatan pada Dinas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yaitu masyarakat yang membutuhkan deteksi dini, rehabilitasi, dan pemulihan kesehatan bagi pengguna narkoba

12. Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

Dalam rangka koordinasi program-program kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan berbasis kesehatan, layanan kesehatan gratis, dan program beasiswa kesehatan.

13. Biro Administrasi Pembangunan (ADBANG)

Mendukung pengelolaan administrasi pembangunan sektor kesehatan, termasuk monitoring, evaluasi, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan fasilitas kesehatan.

14. Biro Pemerintahan

Mendukung koordinasi kebijakan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan regulasi, tata kelola, dan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan, terutama di tingkat kabupaten/kota.

15. Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Ortal)

Membantu dalam penyusunan struktur organisasi, evaluasi kinerja, dan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.

16. Organisasi Masyarakat dan LSM

Dukungan program edukasi kesehatan masyarakat, kampanye pemberdayaan, dan pelayanan promotif/preventif berbasis komunitas.

17. Organisasi Profesi

Dukungan program edukasi kesehatan masyarakat, kampanye pemberdayaan, dan pelayanan promotif/preventif berbasis komunitas.

18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Mitra dalam penyelenggaraan SPM (misal pelayanan persalinan, pengobatan hipertensi, diabetes) serta rujukan pelayanan tingkat lanjut.

19. Perguruan Tinggi

Mitra terkait Dukungan penelitian kesehatan masyarakat, pendampingan teknis, pelatihan kader kesehatan, dan inovasi program berbasis evidence-based

2.1.5 Mitra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemberian Pelayanan antara lain:

1. Dinas Sosial

Penanganan kelompok rentan (anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, korban kekerasan), pelayanan kesehatan darurat saat bencana, dukungan rehabilitasi untuk ODGJ, perluasan jaminan kesehatan sosial (PBI JKN).

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kerjasama dalam pelayanan kesehatan saat bencana (banjir, tanah longsor, kebakaran), termasuk pelayanan kesehatan darurat, pos kesehatan lapangan, dan pengendalian wabah pasca-bencana.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama

Pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dalam bentuk Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang terdiri dari :

- a. Pelayanan Kesehatan
- b. Pendidikan Kesehatan
- c. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Sehat

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Integrasi data kependudukan untuk:

- a. Menentukan sasaran pelayanan kesehatan (misal, ibu hamil, bayi baru lahir, balita).

- b. Mempercepat penerbitan dokumen (KIA, akta lahir) sebagai syarat kepesertaan JKN dan program kesehatan.

5. Dinas Lingkungan Hidup

Kolaborasi dalam pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap kesehatan, seperti: pengelolaan sampah domestik, pengelolaan limbah medis, dan pengendalian pencemaran udara.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Integrasi program kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD), advokasi anggaran kesehatan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7. Dinas Pemuda dan Olahraga

Dukungan program promosi kesehatan melalui aktivitas fisik, kampanye pola hidup sehat, dan penyelenggaraan event olahraga Masyarakat.

8. Dinas Perhubungan

Kolaborasi dalam melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi sangat penting untuk mendukung keselamatan transportasi darat, khususnya dalam mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi kesehatan pengemudi yang tidak layak dalam bentuk kegiatan : Pemeriksaan Kesehatan Berkala bagi Pengemudi.

9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kolaborasi dalam melakukan pembinaan tenaga kerja sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif dalam bentuk : Pembinaan Bersama Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Program Pemeriksaan Kesehatan Berkala, Advokasi dan Sosialisasi Peraturan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Melalui Pos UKK (Upaya Kesehatan Kerja)

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Kolaborasi untuk perlindungan kesehatan ibu, anak, dan korban kekerasan, serta program kesehatan reproduksi ramah gender.

11. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Mitra terkait deteksi dini, rehabilitasi, dan pemulihan kesehatan bagi pengguna narkoba

12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kontribusi dalam pelaksanaan pengendalian penyakit bersumber hewan (*zoonosis*) yaitu antara lain vaksinasi anti rabies, pelaporan penyakit yang terduga berasal dari hewan.

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam penyelenggaraan layanan kesehatan berbasis masyarakat, mendorong penguatan Posyandu, Poskesdes, dan kegiatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) lainnya di tingkat desa dan kelurahan, mewujudkan desa sehat melalui program Desa Siaga Aktif, Desa Bebas Stunting, dan program desa lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, membina dan memberdayakan kader desa, kader kesehatan, serta organisasi masyarakat desa dalam mendukung pelayanan promotif, preventif, dan kuratif dasar, serta menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan kebutuhan pembangunan kesehatan, termasuk integrasi program kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

14. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Dalam rangka mendukung program kesehatan reproduksi, pengendalian penduduk, penurunan angka *stunting*, serta pelayanan keluarga berencana dan kesehatan keluarga.

15. Biro Kesejahteraan Rakyat (KESRA)

Dalam rangka koordinasi program-program kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan berbasis kesehatan, layanan kesehatan gratis, dan program beasiswa kesehatan.

16. Biro Administrasi Pembangunan (ADBANG)

Mendukung pengelolaan administrasi pembangunan sektor kesehatan, termasuk monitoring, evaluasi, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan fasilitas kesehatan.

17. Biro Pemerintahan

Mendukung koordinasi kebijakan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan regulasi, tata kelola, dan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan, terutama di tingkat kabupaten/kota.

18. Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Ortal)

Membantu dalam penyusunan struktur organisasi, evaluasi kinerja, dan reformasi birokrasi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.

19. Biro Barang dan Jasa (Barjas)

Memastikan pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan, seperti alat kesehatan, obat-obatan, serta pembangunan fasilitas kesehatan, berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.

20. Organisasi Masyarakat dan LSM

Dukungan program edukasi kesehatan masyarakat, kampanye pemberdayaan, dan pelayanan promotif/preventif berbasis komunitas.

21. Organisasi Profesi

Dukungan program edukasi kesehatan masyarakat, kampanye pemberdayaan, dan pelayanan promotif/preventif berbasis komunitas.

22. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta

Mitra dalam penyelenggaraan SPM (misal pelayanan persalinan, pengobatan hipertensi, diabetes) serta rujukan pelayanan tingkat lanjut.

23. Perguruan Tinggi

Mitra terkait Dukungan penelitian kesehatan masyarakat, pendampingan teknis, pelatihan kader kesehatan, dan inovasi program berbasis evidence-based.

2.1.6 Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Pencapaian kinerja Dinas Provinsi Kalimantan Timur tidak lepas dari dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu diantaranya:

1. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

BUMD yang mendukung terkait ketersediaan sumber energi listrik

2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di kabupaten/kota

BUMD mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi.

3. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bank Kaltimara)

BUMD yang mendukung pada sektor perbankan.

2.1.7 Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur meliputi bentuk kerja sama antar daerah (provinsi, kabupaten/kota) atau dengan pihak lain di wilayah regional untuk memperkuat pelayanan kesehatan. Bentuk kerjasama tersebut adalah:

1. Kerjasama Antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

- a. Dalam pelayanan rujukan pasien antar kabupaten/kota (rujukan berjenjang).
- b. Penanggulangan bersama wabah penyakit menular, bencana kesehatan, dan kondisi kegawatdaruratan kesehatan masyarakat.
- c. Penguatan sistem pelayanan kesehatan rujukan regional, misal dalam pengembangan RS rujukan provinsi atau jejaring laboratorium kesehatan daerah.

2. Kerjasama dengan Provinsi Tetangga

- a. Dalam upaya penanganan kesehatan lintas batas wilayah, terutama di daerah perbatasan (contoh: kerjasama pelayanan kesehatan antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara di wilayah berbatasan).
- b. Kolaborasi dalam pengendalian penyakit menular lintas provinsi seperti TB, malaria, HIV/AIDS.

3. Kerjasama dengan BUMD dan BUMN

Untuk penguatan sarana dan prasarana kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit, penyediaan ambulans, pengadaan alat kesehatan, dan program CSR untuk kesehatan masyarakat.

4. Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan LSM

Dalam kampanye kesehatan, penyuluhan, pelatihan kader kesehatan, hingga program berbasis masyarakat seperti Posyandu, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan program percepatan penurunan *stunting*.

5. Kerjasama dengan Institusi Pendidikan

Dengan perguruan tinggi, politeknik kesehatan, untuk pengembangan tenaga kesehatan, penelitian bidang kesehatan masyarakat, serta program magang dan praktik profesi tenaga kesehatan.

6. Kerjasama Khusus untuk Daerah Perbatasan dan Kepulauan

Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar di wilayah-wilayah sulit jangkauan melalui kerjasama lintas sektor, termasuk dengan aparat keamanan (TNI/Polri) dalam pelayanan kesehatan terpadu di daerah perbatasan.

7. Kerjasama dengan Universitas Adelaide, Australia

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan University of Adelaide, South Australia yang sudah terjalin lebih dari 15 Tahun, pada tanggal 19 April Tahun 2024 dilakukan MoU untuk melanjutkan kerjasama khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan penelitian.

Kerjasama yang selama ini telah dilakukan terkait Kesehatan Ibu dan Anak. Saat ini, sejak tahun 2023 dilakukan pengembangan model promosi kesehatan di rumah sakit (PKRS) dengan fokus pada pencegahan penyakit kardiovaskular. Kerjasama tersebut dilakukan di dua rumah sakit yang ada di Kalimantan Timur yaitu RSUD A.W. Sjahranie Kota Samarinda dan RSUD A.M. Parikesit Kab. Kutai Kartanegara.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Pelayanan kesehatan yang optimal merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Namun demikian, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam memberikan layanan yang merata, efektif, dan berkualitas kepada masyarakat. Dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 sampai dengan 2024 masih ada beberapa masalah yang perlu untuk diselesaikan.

Permasalahan yang dihadapi, baik dari segi sistem, sumber daya, maupun pelaksanaan kebijakan di lapangan antara lain:

1. Sarana, prasarana dan alat Kesehatan pada beberapa fasilitas kesehatan belum memenuhi standar serta manajemen pemeliharaan dan aset belum optimal.
2. Ketersediaan (jumlah, jenis dan distribusi) dan kompetensi SDM belum sesuai standar

3. Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi (aplikasi terkait data dari kemkes yg banyak)
4. Lemahnya Kelembagaan dan Tata Kelola Kesehatan dalam hal Transformasi BLUD, Integrasi Program, dan Optimalisasi Anggaran
5. Kesenjangan akses dan mutu layanan kesehatan antar wilayah
6. Prevalensi stunting, kematian ibu dan bayi masih tinggi
7. Tingginya kasus DBD, diare, ISPA, dan penyakit berbasis lingkungan dan tingginya prevalesi penyakit tidak menular.
8. Sistem informasi belum terintegrasi dan belum berbasis data spasial
9. Inovasi pelayanan digital belum optimal, terutama di daerah terpencil
10. Rendahnya pemantauan pertumbuhan pada balita
11. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan belum optimal

2.2.2 Isu strategis

Isu strategis di bidang kesehatan merupakan tantangan utama yang perlu mendapat perhatian khusus karena berdampak langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat. Identifikasi isu-isu ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika epidemiologi, ketersediaan dan pemerataan layanan, perubahan sosial demografis, serta kapasitas sistem kesehatan, guna memastikan perumusan kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Tabel 2. 14 Perumusan Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN OPD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alokasi anggaran 2025-2029 untuk pengembangan & pembangunan RS serta pemenuhan Dokter spesialis	Sarana, prasarana dan alat Kesehatan pada beberapa faskes belum memenuhi standar serta manajemen pemeliharaan dan aset belum optimal.	Ketimpangan pelayanan kesehatan di wilayah DTPK	Keadilan akses layanan kesehatan (UHC)	RPJMN & SPM	Keterbatasan sarpras dan SDM kesehatan di kabupaten tertentu	Pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan melalui pemenuhan sumber daya kesehatan
	Ketersediaan (jumlah, jenis dan distribusi) dan kompetensi SDM belum sesuai standar	Sanitasi buruk, gizi kurang, dan rendahnya layanan esensial	Kekurangan gizi (SDG 2) berdampak langsung terhadap kesehatan fisik dan mental (SDG 3), terutama pada anak-anak dan ibu hamil.	Percepatan penurunan stunting	Prevalensi stunting tinggi di kabupaten pesisir & pedalaman	Penurunan stunting dan peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui upaya pelayanan kesehatan
	Prevalensi stunting, kematian ibu dan bayi masih tinggi					
Tingginya kasus DBD, diare, ISPA, dan penyakit berbasis lingkungan dan tingginya prevalesi penyakit tidak menular.						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN OPD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di sebagian besar wilayah	Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi	Kualitas lingkungan dan sanitasi rendah	Perubahan iklim dan dampaknya terhadap kesehatan	Peraturan STBM	Limbah, air bersih, dan sanitasi belum optimal	Penguatan upaya promotif dan preventif serta kesehatan lingkungan
Potensi penguatan program kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat	Lemahnya Kelembagaan dan Tata Kelola Kesehatan dalam hal Transformasi BLUD, Integrasi Program, dan Optimalisasi Anggaran	Rendahnya pemanfaatan data lingkungan dalam perencanaan	Transformasi digital	Satu Data Kesehatan	Belum semua fasyankes menggunakan aplikasi SIK terintegrasi	Penguatan tata kelola dan sistem informasi kesehatan terintegrasi
Dukungan infrastruktur dan SDM untuk sistem informasi Kesehatan	Sistem informasi belum terintegrasi dan belum berbasis data spasial	Keterbatasan infrastruktur TIK untuk layanan kesehatan	Digital health	Strategi Transformasi Digital Kesehatan	Rendahnya literasi dan konektivitas di DTPK	Pengembangan layanan kesehatan digital dan inovatif
Luasnya wilayah dengan kondisi lingkungan yang belum sehat	Kesenjangan akses dan mutu layanan kesehatan antar wilayah	Ketimpangan Distribusi Fasilitas Kesehatan	Ketidakmerataan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Antar Negara dan Wilayah	Disparitas Distribusi Tenaga Kesehatan	Konsentrasi rumah sakit dan tenaga kesehatan lebih banyak di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan.	Penuntasan penyakit menular dan tidak menular

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan visi pembangunan untuk periode 2025–2029 dengan tajuk “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”. Visi ini mencerminkan tekad kuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kerangka visi tersebut, tujuan diarahkan pada Terbangunnya Generasi Emas, yang diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (IMH). Indeks ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat, yang merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi masa depan yang produktif dan berkualitas.

Salah satu komponen kunci untuk mencapai tujuan tersebut dengan sasaran yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Upaya ini difokuskan pada peningkatan angka Umur Harapan Hidup (UHH) dan penurunan prevalensi stunting, yang menjadi indikator utama keberhasilan sektor kesehatan. Sasaran ini selaras dengan program prioritas di berbagai level yang mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kesehatan.

Melalui pendekatan ini, Kalimantan Timur diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik dan mental, yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya visi besar menuju Generasi Emas 2045.

Tujuan dan sasaran dirancang untuk menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, sementara strategi dan arah kebijakan disusun untuk memastikan pencapaian tujuan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 yaitu:

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”

Dengan indikator tujuan antara lain:

1. Usia Harapan Hidup (UHH)
2. Prevalensi *Stunting*

3.1 Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, diambil beberapa sasaran untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, diantaranya adalah:

1. Sasaran 1: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar
Indikator:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan
 - b. Persentase Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dengan SDMK sesuai Standar
 - c. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan SPA sesuai Standar
 - d. Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Nilai SPM Kesehatan
2. Sasaran 2: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
Indikator:
 - a. Meningkatnya AKIP Perangkat Daerah



Tabel 3. 1 Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup	74.99	75.04	75.08	75.13	75.18	75.25	Tahun
			Prevalensi <i>Stunting</i>	19.8	18.4	17.2	16	14.8	13.9	Persen
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	87.5	88	88	88.5	89	89,5	Persen
			Persentase Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi dengan SDMK sesuai Standar	54	60	64	70	76	77	Persen
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan SPA sesuai Standar	74	80	86	92	98	100	Persen
			Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Nilai SPM Kesehatan	7	8	9	9	10	10	Kabupaten
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	74	78	82	85	87	89	Persen

3.2 Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025–2029 maka diperlukan suatu strategi terarah dan terukur untuk mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan, peluang, serta dinamika pembangunan daerah di bidang kesehatan.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 dirancang selaras dengan arah kebijakan nasional serta menjawab kebutuhan masyarakat antara lain:

- 1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan**

Upaya untuk memastikan bahwa Masyarakat memiliki akses yang mudah dan cepat terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas.

- 2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Upaya untuk mengurangi beban penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

- 3. Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Profesional dan Terdistribusi Merata**

Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diarahkan pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan agar pelayanan dapat menjangkau hingga daerah terpencil dan perbatasan. Melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penerapan standar kompetensi, serta kebijakan penempatan yang adil dan berbasis kebutuhan, diharapkan terwujud tenaga kesehatan yang unggul, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan Masyarakat

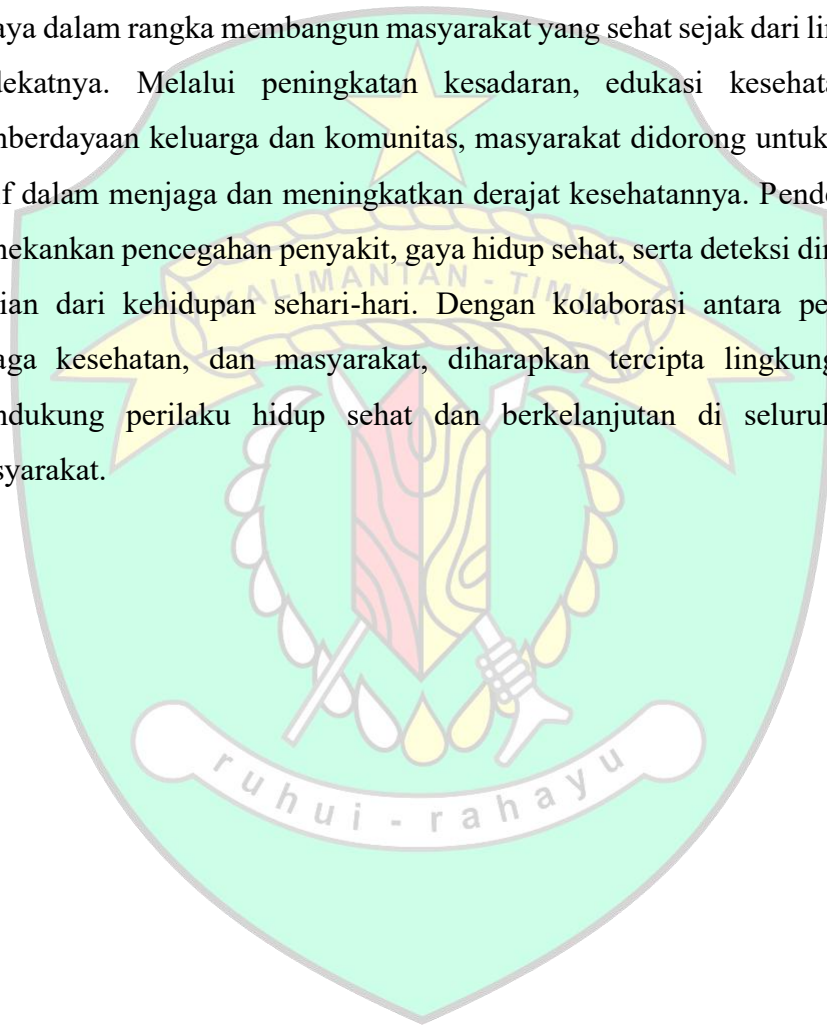
- 4. Transformasi Layanan Kesehatan Melalui Digitalisasi dan Sistem Informasi Terpadu**

Upaya dalam mewujudkan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital seperti rekam medis elektronik, telemedisin, dan integrasi data kesehatan nasional memungkinkan

proses pelayanan yang cepat, akurat, serta berkesinambungan antar fasilitas kesehatan. Dengan sistem informasi yang terhubung dan aman, pengambilan keputusan medis maupun kebijakan dapat dilakukan berbasis data yang valid. Inisiatif ini menjadi langkah strategis menuju ekosistem kesehatan yang modern, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu hidup masyarakat.

5. Penguatan Upaya Promotif dan Preventif Berbasis Keluarga dan Komunitas

Upaya dalam rangka membangun masyarakat yang sehat sejak dari lingkungan terdekatnya. Melalui peningkatan kesadaran, edukasi kesehatan, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. Pendekatan ini menekankan pencegahan penyakit, gaya hidup sehat, serta deteksi dini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.



Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur periode Tahun 2026 -2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Fokus Tahunan: Perencanaan dan persiapan pembangunan sumber daya kesehatan	Fokus Tahunan: Pembangunan sumber daya kesehatan	Fokus Tahunan: Penyediaan sumber daya kesehatan	Fokus Tahunan: Pemenuhan sumber daya kesehatan	Fokus Tahunan: Pemerataan sumber daya kesehatan
Prioritas Pembangunan: 1. Identifikasi dan rehabilitasi fasyankes dasar dan rujukan 2. Kampanye PHBS dan imunisasi 3. Pemetaan kebutuhan SDM 4. Pengembangan sistem informasi dasar 5. Peningkatan peran Posyandu	Prioritas Pembangunan: 1. Pembangunan fasyankes rujukan daerah terpencil 2. Penanganan <i>stunting</i> dan penyakit menular 3. Distribusi tenaga dan pelatihan dasar 4. Implementasi dashboard Kesehatan 5. Pelatihan kader dan edukasi keluarga	Prioritas Pembangunan: 1. Evaluasi kinerja fasyankes dan penguatan pelayanan 2. Penguatan layanan KIA dan gizi 3. Pelatihan lanjutan dan pengembangan kompetensi 4. Integrasi aplikasi layanan 5. Program kesehatan berbasis komunitas	Prioritas Pembangunan: 1. Integrasi layanan rujukan 2. Pemantapan layanan UKM 3. Evaluasi dan sistem insentif 4. Pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan 5. Kolaborasi lintas sektor	Prioritas Pembangunan: 1. Optimalisasi manajemen fasilitas Kesehatan 2. Pengendalian penyakit berbasis data 3. Pemantapan sistem manajemen SDM 4. Digitalisasi secara menyeluruh 5. Monitoring dan inovasi promosi kesehatan

3.3 Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025–2029, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan sistem kesehatan yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini disusun sebagai panduan dalam perumusan program dan kegiatan, serta sebagai respon terhadap berbagai tantangan pembangunan kesehatan yang dihadapi di tingkat daerah maupun nasional. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang sehat dan produktif.

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - a. Pemetaan wilayah prioritas yang belum memiliki fasilitas Kesehatan.
 - b. Pengadaan Hospital sheep di daerah DTPK, untuk peningkatan kompetensi.
 - c. Pembangunan atau peningkatan kapasitas RSUD dan RS Rujukan daerah.
 - d. Peningkatan aksesibilitas ke fasilitas (jalan, air bersih, listrik, jaringan internet).
2. Penguatan kapasitas SDM dan distribusi tenaga kesehatan yang proporsional
 - a. Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Secara Proporsional Pengembangan sistem informasi manajemen SDM kesehatan (SIM SDM).
 - b. Pemenuhan sdmk khususnya dokter spesialis dengan kegiatan *academic health system* yang dilaksanakan oleh universitas dan *hospital based* yang dilaksanakan oleh kemenkes RI melalui RS Pendidikan sebagai penyelenggara utama
 - c. Penguatan kapasitas pengelola SDM di Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.
 - d. Monitoring dan evaluasi distribusi serta kinerja tenaga kesehatan secara berkala.
 - e. Penyesuaian jumlah dan kualifikasi tenaga sesuai kebutuhan pelayanan dan SPM kesehatan.

3. Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi
 - a. Integrasi data dan sistem informasi kesehatan
 - b. Penerapan sistem rekam medis elektronik dan antrean digital.
 - c. Penguatan layanan telemedicine antar fasilitas dasar dan rujukan.
 - d. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penggunaan aplikasi digital kesehatan.
4. Penguatan manajemen pembiayaan Kesehatan
 - a. Penyusunan *health financing strategy* daerah/nasional.
 - b. Analisis kebutuhan pendanaan kesehatan (health needs assessment).
 - c. Penguatan proses perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning).
 - d. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran antara dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan BPJS.
 - e. Pelatihan manajemen keuangan kesehatan bagi pengelola program dan keuangan.
5. Penguatan kesehatan masyarakat dan inovasi promosi Kesehatan
 - a. Melaksanakan program eliminasi penyakit menular seperti TBC dan malaria.
 - b. Menurunkan prevalensi stunting dengan pendekatan multisektor.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
 - d. Menurunkan prevalensi penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	<p>Pemenuhan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 2. Peningkatan Mutu, Standar, dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 3. Penguatan Sistem Rujukan Terintegrasi <p>Penguatan kapasitas SDM dan distribusi tenaga kesehatan yang proposional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Secara Proporsional 2. Pengembangan sistem informasi manajemen SDM kesehatan (SIM SDM). 3. Penguatan kapasitas pengelola SDM di Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Monitoring dan evaluasi distribusi serta kinerja tenaga kesehatan secara berkala. 	Pemerataan akses dan mutu pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan melalui pemenuhan sumber daya Kesehatan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>4. Penyesuaian jumlah dan kualifikasi tenaga sesuai kebutuhan pelayanan dan SPM kesehatan.</p> <p>Penguatan manajemen pembiayaan Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan <i>health financing strategy</i> daerah/nasional. 2. Analisis kebutuhan pendanaan kesehatan (health needs assessment). 3. Penguatan proses perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). 4. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran antara dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan BPJS. 5. Pelatihan manajemen keuangan kesehatan bagi pengelola program dan keuangan. 	Pemenuhan pembiayaan layanan Kesehatan melalui pembiayaan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat
			Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Melalui Pencegahan dan Pengendalian	Penguatan kesehatan masyarakat dan inovasi promosi Kesehatan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penyakit Menular dan Tidak Menular	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program eliminasi penyakit menular seperti TBC dan malaria. 2. Menurunkan prevalensi stunting dengan pendekatan multisektor. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 4. Menurunkan prevalensi penyakit tidak menular dan Kesehatan jiwa 	
			Transformasi Layanan Kesehatan Melalui Digitalisasi dan Sistem Informasi Terpadu	<p>Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah yang terintegrasi Integrasi data dan sistem informasi kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi data dan sistem informasi kesehatan 2. Penerapan sistem rekam medis elektronik dan antrean digital. 3. Penguatan layanan telemedicine antar fasilitas dasar dan rujukan. 4. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penggunaan aplikasi digital kesehatan. 	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan RENSTRA	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penguatan Upaya Promotif dan Preventif Berbasis Keluarga dan Komunitas	Mendorong penyelenggaraan program kesehatan berbasis keluarga dan komunitas. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kampanye dan edukasi kesehatan yang berbasis budaya lokal. 2. Pembinaan dan revitalisasi Posyandu 3. Melakukan pendampingan keluarga berisiko melalui kader dan tenaga Kesehatan 4. Pelatihan kader dalam komunikasi, pencatatan data, dan edukasi kesehatan keluarga. 	Meningkatkan upaya promotif-preventif Kesehatan melalui peningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta Arah Kebijakan dan Strategi Daerah yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka disusunlah program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk kurun waktu 2025-2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Setiap program, kegiatan dan sub kegiatan mencerminkan upaya Dinas Kesehatan dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan dengan nomenklatur berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kemendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

4.1.1 Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur disusun secara terarah, terpadu, dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan masyarakat Kalimantan Timur serta perkembangan regulasi nasional. Adapun program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Program dan Indikator Program Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

No	Program/outcome	Indikator Program	Baseline	Target						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kesakitan (Angka)	8.42	8.22	8.05	7.87	7.69	7.51	7.32	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (Persen)	100.88	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Laboratorium Kesehatan (UPTD Labkes Prov. Kaltim)	Persentase Pemeriksaan Laboratorium UKP dan UKM yang terselesaikan (Presen)	85	85	89	91	93	95	95	
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (UOBK RS Mata)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Persen)	80	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (UOBK RSUD AMS II)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Persen)	75	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD A. Wahab Sjahranie)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Persen)	87	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (Persen)	87	100	100	100	100	100	100	

No	Program/outcome	Indikator Program	Baseline	Target						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar (Persen)	60.16	73.94	80	86	92	98	100	
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persen)	62	54	60	64	70	76	82	
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per Seratus Ribu Penduduk)	66	69	73	76	80	84	89	
	Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan (UPTD Bapelkes)	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persen)	35	45	50	55	60	65	70	
	Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (UOBK RS Mata)	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persen)	70	75	80	85	90	95	100	
	Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (UOBK RSUD AMS II)	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persen)	70	75	80	85	90	95	100	
	Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (UOBK RSUD A. Wahab Sjahranie)	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persen)	35	45	50	55	60	65	70	
	Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo)	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persen)	40	45	63	65	67	69	70	
Meningkatnya Mutu Tenaga Kesehatan Rumah Sakit (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persen)	95.79	95.80	95.82	95.83	95.84	95.85	95.86		

No	Program/outcome	Indikator Program	Baseline	Target						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi	Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Persen)	87	87.5	88	88.5	89	89.5	90
			Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UPTD Bapelkes)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90	90	100	100	100	100	100
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	

No	Program/outcome	Indikator Program	Baseline	Target						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UPTD Laboratorium Kesehatan)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Persen)	90	90	100	100	100	100	100	100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UOBK RS Mata)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Persen)	90	90	100	100	100	100	100	100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UOBK RSUD AMS II)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90	90	100	100	100	100	100	100
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UOBK RSUD A. Wahab Sjahranie)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Presen)	80	82	83	84	85	86	87	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (Presen)	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UOBK RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Presen)	100	65	100	100	100	100	100	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Presen)	98.4	98.41	98.42	98.43	98.44	98.45	98.46	
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	

4.1.2 Uraian Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan di daerah, yang biasanya bersifat operasional dan dilaksanakan berdasarkan program kerja tahunan, Rencana Strategis, atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Tabel 4. 2 Uraian Kegiatan dan Indikator Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2023

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit milik pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan minimal 70% (Persen)	65	65	67	68	70	71	72
		Persentase Rumah Sakit milik pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan minimal 70% (Persen) (UPTD Labkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Rumah Sakit milik pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan minimal 70% (Persen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	98	98	98	98	98	98	98
		Persentase Rumah Sakit milik pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan minimal 70% (Persen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	90	90	75	75.3	75.6	75.9	76
		Persentase Rumah Sakit milik pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan minimal 70% (Persen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	0	80	98	98.5	99	100	100
		Persentase Rumah Sakit milik pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan minimal 70% (Persen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)	NA	90	90	90	90	90	90
		Persentase Rumah Sakit milik pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan minimal 70% (Persen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	91.81	91.83	91.85	91.87	91.89	91.91	91.93
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Persen)	91.25	91.50	91.75	92.00	92.25	92.50	92.75

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Persen)	NA	75	80	81	81	82	82
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun (Persen)	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun (Persen)	28	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (Persen)	12.50	12.40	12	11.5	11	10	9
		Cakupan penemuan kasus TB (Presen)	58	85	85	85	90	90	90
		Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta (Persen)	-	0	0	0	0	1	1
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
		Kab/Kota sanitasi total berbasis Masyarakat (Kab/Kota)	NA	1	2	3	5	7	7
		Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (Persen)	NA	1	2	3	5	7	7
		Persentase lanjut usia yang mandiri (Presen)	94	94	95	96	97	98	98
		Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (Presen) (UPTD Labkes)	100	100	100	100	100	100	100
Persentase terlaksananya ayanan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (Presen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	100	100	100	100	100	100	100		

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (Presen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (Presen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (Presen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan (Presen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan (Persen)	80	82	84	86	88	90	95
		Persentase penerapan system informasi kesehatan terintegrasi (Persen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	0	0	0	75	75	75	75
		Persentase penerapan system informasi kesehatan terintegrasi (Persen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	96	95	100	100	100	100	100
		Persentase penerapan system informasi kesehatan terintegrasi (Persen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	50	80	85	90	95	100	100
		Persentase penerapan system informasi kesehatan terintegrasi (Persen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)	60	60	60	70	80	90	100

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase penerapan system informasi kesehatan terintegrasi (Persen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	NA	16.67	33.33	50	66.67	83.33	100
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (Persen)	88	88	88	88	95	100	100
		Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan Kesehatan (Persen)	84	85	85	85	85	85	90
5	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
6	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
7	Perencanaan Kebutuhan SDMK untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK provinsi dan kab/kota (Jumlah)	11	11	11	11	11	11	11
		Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar (Persen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	80	80	80	85	90	95	100
		Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar (Persen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar (Persen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	92.40	92.45	92.50	92.55	92.60	92.65	92.70

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Tingkat daerah provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM (Kab/Kota)	8	9	10	10	10	10	10
		Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan minimal 20 JPL (Persen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	NA	50	0	50	55	60	65
		Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan minimal 20 JPL (Persen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	59	61	62	63	64	65	66
		Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan minimal 20 JPL (Persen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)	60	60	61	62	63	64	65
		Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan minimal 20 JPL (Persen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	95.79	100	100	100	100	100	100
9	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten /Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
10	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persentase Kabupate/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah (Persen)	100	100	100	100	100	100	100

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
12	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
13	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran gaji ASN dan pelaksanaan penatausahaan keuangan yang akuntabel (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pembayaran gaji ASN dan pelaksanaan penatausahaan keuangan yang akuntabel (Persen) (UPTD Bapelkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pembayaran gaji ASN dan pelaksanaan penatausahaan keuangan yang akuntabel (Persen) (UPTD Labkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pembayaran gaji ASN dan pelaksanaan penatausahaan keuangan yang akuntabel (Persen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pembayaran gaji ASN dan pelaksanaan penatausahaan keuangan yang akuntabel (Persen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pembayaran gaji ASN dan pelaksanaan penatausahaan keuangan yang akuntabel (Persen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pembayaran gaji ASN dan pelaksanaan penatausahaan keuangan	100	100	100	100	100	100	100

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		yang akuntabel (Persen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)							
		Persentase Pembayaran gaji ASN dan pelaksanaan penatausahaan keuangan yang akuntabel (Persen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	100	100	100	100	100	100	100
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan (Persen) (UPTD Labkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan (Persen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan (Persen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan (Persen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan (Persen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan (Persen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	100	100	100	100	100	100	100

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Presen)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Presen) (UPTD Bapelkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Presen) (UPTD Labkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Presen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Presen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Presen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Presen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Presen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	100	100	100	100	100	100	100
		17	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu (Persen)	100	100	100	100	100
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu (Persen) (UPTD Bapelkes)	100			100	100	100	100	100	100
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu (Persen) (UPTD Labkes)	100			100	100	100	100	100	100

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu (Persen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu (Persen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu (Persen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu (Persen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu (Persen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	100	100	100	100	100	100	100
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Persen) (UPTD Bapelkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Persen) (UPTD Labkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Persen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Persen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	100	100	100	100	100	100	100

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Persen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Persen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik (Persen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	100	100	100	100	100	100	100
19	Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD (Presen) (UPTD Bapelkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD (Presen) (UPTD Labkes)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD (Presen) (UOBK Rumah Sakit Mata)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD (Presen) (UOBK RS Aji Muhammad Salehuddin II)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD (Presen) (UOBK RSUD Abdul Wahab Sjahranie)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD (Presen) (UOBK dr. Kanujoso Djatiwibowo)	100	100	100	100	100	100	100

No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024 (Baseline)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD (Presen) (UOBK RSJD Atma Husada Mahakam)	100	100	100	100	100	100	100



4.1.3 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyusun berbagai sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah. Uraian sub kegiatan berikut mencakup kinerja yang diharapkan, indikator capaian, target yang ingin diraih, serta alokasi pagu indikatif sebagai dasar perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Adapun indikator capaian, target, serta alokasi pagu indikatif dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:



Tabel 4. 3 Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pagu Indikatif Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target												
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
TOTAL DINKES + UPTD						2,594,999,472,565		2,518,701,112000		2,520,154,714,000		2,654,887,702,000		2,789,803,730,000		2,951,493,252,000
DINAS KESEHATAN						696,255,525,428		624,494,284,279		510,189,307,700		523,357,804,000		528,912,327,000		552,445,787,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	111,239,601,346	90	102,344,727,594	100	106,616,765,000	100	111,718,728,000	100	114,223,904,000	100	115,714,427,000	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai waktu yang ditetapkan	Persen	100	100	919,697,000	100	1,148,751,000	100	1,035,851,000	100	1,148,751,000	100	1,148,751,000	100	1,148,751,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	503,958,000	7	762,900,000	7	650,000,000	7	762,900,000	7	762,900,000	7	762,900,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	111,799,000	2	160,871,000	2	160,871,000	2	160,871,000	2	160,871,000	2	160,871,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	303,940,000	8	224,980,000	8	224,980,000	8	224,980,000	8	224,980,000	8	224,980,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Akuntabel	Persen	100	100	88,490,156,799	190	93,541,115,044	100	98,015,639,450	100	102,895,115,450	100	105,400,291,450	100	106,890,814,450	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	187	187	87,768,760,799	190	92,714,947,044	190	97,306,071,450	190	102,068,947,450	190	104,574,123,450	190	106,064,646,450	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	613,200,000	1	729,800,000	1	613,200,000	1	729,800,000	1	729,800,000	1	729,800,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	8,920,000	1	8,763,000	1	8,763,000	1	8,763,000	1	8,763,000	1	8,763,000	

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	13,120,000	12	21,909,000	12	21,909,000	12	21,909,000	12	21,909,000	12	21,909,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	86,156,000	1	65,696,000	1	65,696,000	1	65,696,000	1	65,696,000	1	65,696,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	100	100	280,900,000	100	296,168,000	100	296,168,000	100	296,168,000	100	296,168,000	100	296,168,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2.	2	0	2	156,000,000	2	156,000,000	2	156,000,000	2	156,000,000	2	156,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80.	80	280,900,000	80	140,168,000	80	140,168,000	80	140,168,000	80	140,168,000	80	140,168,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	6,258,287,824	100	2,320,913,288	100	2,320,913,288	100	2,320,913,288	100	2,320,913,288	100	2,320,913,288
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1.00	1	39,987,072	1	20,394,000	1	20,394,000	1	20,394,000	1	20,394,000	1	20,394,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	936,960,052	5	534,045,288	5	534,045,288	5	534,045,288	5	534,045,288	5	534,045,288
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	3	30,022,200	3	75,931,000	3	75,931,000	3	75,931,000	3	75,931,000	3	75,931,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	29,988,000	12	14,834,000	12	14,834,000	12	14,834,000	12	14,834,000	12	14,834,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	5,221,330,500	12	1,675,709,000	12	1,675,709,000	12	1,675,709,000	12	1,675,709,000	12	1,675,709,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	0	100	0	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	0	0	0	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu	Persen	100	100	14,371,912,264	100	3,969,101,262	100	3,969,101,262	100	3,969,101,262	100	3,969,101,262	100	3,969,101,262
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.00	1	19,478,000	1	8,781,262	1	8,781,262	1	8,781,262	1	8,781,262	1	8,781,262
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1.00	1	1,465,767,800	1	1,370,000,000	1	1,370,000,000	1	1,370,000,000	1	1,370,000,000	1	1,370,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.00	1	12,886,666,464	1	2,590,320,000	1	2,590,320,000	1	2,590,320,000	1	2,590,320,000	1	2,590,320,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	918,647,459	100	1,068,679,000	100	959,092,000	100	1,068,679,000	100	1,068,679,000	100	1,068,679,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	38	38	383,895,999	38	298,728,000	38	298,728,000	38	298,728,000	38	298,728,000	38	298,728,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	10,00	10	200,000,000	10	559,587,000	10	450,000,000	10	559,587,000	10	559,587,000	10	559,587,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	90	90	334,751,460	90	210,364,000	90	210,364,000	90	210,364,000	90	210,364,000	90	210,364,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Nilai	8,42	8,22	546,725,219,341	8,05	481,331,880,251	7,87	362,586,542,700	7,69	369,623,076,000	7,51	372,642,423,000	7,32	394,655,360,000
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	96	100		100		100		100		100		100	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKM Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Rumah Sakit Milik Pemerintah yang memenuhi sarana dan prasarana alat kesehatan minimal 70%	Persen	65	65	272,122,347,136	67	227,640,723,311	68	96,395,385,760	70	103,731,919,060	71	106,751,266,060	72	128,764,203,060
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	Persen	91,25	91,50		91,75		92		92,25		92,50		92,75	
	Persentase Kabupaten /Kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	NA	75		80		81		81		82		82	
Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1: 1000	Unit	0	0		2	12,500,000,000								
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	unit	0	0	-	0	-	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,000,000
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	4	4	714,000,000	5	762,549,000	5	762,549,000	5	762,549,000	5	762,549,000	5	762,549,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1	0	1	28,007,784,000	1	26,007,784,000	1	26,007,784,000	1	26,007,784,000	1	26,007,784,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	Unit	22	22	93,000,000	24	259,110,000	24	259,110,000	24	259,110,000	24	259,110,000	24	259,110,000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Unit	1	723	259,787,280,636	1	169,556,427,251	1	50,811,089,700	1	58,147,623,000	1	61,166,970,000	1	83,179,907,000
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	28	28	10,920,000	30	9,567,000	30	9,567,000	30	9,567,000	30	9,567,000	30	9,567,000
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	8.00	8	12,222,000	10	53,340,000	10	53,340,000	10	53,340,000	10	53,340,000	10	53,340,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	2.00	2	1,315,624,500	2	1,170,351,000	2	1,170,351,000	2	1,170,351,000	2	1,170,351,000	2	1,170,351,000
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang tingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan pelayanan Rumah Sakit	Unit	2.00	2	-	2	-	3	2,000,000,000	3	2,000,000,000	4	2,000,000,000	4	2,000,000,000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1.00	1	10,189,300,000	1	15,321,595,060	1	15,320,595,060	1	15,320,595,060	1	15,320,595,060	1	15,320,595,060
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 Tahun	Persen	2,2	2,2	274,162,575,205	2,1	252,528,200,940	2,1	265,028,200,940	2,0	264,728,200,940	2,0	264,728,200,940	1,9	264,728,200,940
	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	Persen	28.00	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4	
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	12.5	12.4		12.0		11.5		11.0		10.0		9.0	
	Cakupan penemuan kasus TB	Persen	58	85		85		85		90		90		90	
	Kabupaten/ Kota dengan eliminasi kusta	Persen	-	0		0		0		0		1		1	
	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
	Kab/Kota sanitasi total berbasis Masyarakat	Kab/Kota	NA	1		2		3		5		7		7	
	Persentase Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Persen	NA	1		2		3		5		7		7	

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Persentase lanjut usia yang mandiri	Persen	94	94		95		96		97		98		98	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	2,096,543	2,096,543	777,875,000	2,096,543	1,489,975,000	2,096,543	1,489,975,000	2,096,543	1,489,975,000	2,096,543	1,489,975,000	2,096,543	1,489,975,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	200	200	800,272,000	225	2,238,321,000	225	2,238,321,000	225	2,238,321,000	225	2,238,321,000	225	2,238,321,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	2,382,285,601	1	1,993,571,000	1	1,993,571,000	1	1,993,571,000	1	1,993,571,000	1	1,993,571,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	1	337,613,000	1	947,130,000	1	947,130,000	1	947,130,000	1	947,130,000	1	947,130,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	1	379,900,000	1	749,146,000	1	749,146,000	1	749,146,000	1	749,146,000	1	749,146,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1	3,629,125,813	1	2,861,208,560	1	2,861,208,560	1	2,861,208,560	1	2,861,208,560	1	2,861,208,560
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	1	1,036,614,780	1	613,096,000	1	613,096,000	1	613,096,000	1	613,096,000	1	613,096,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	1,231,302,540	1	796,470,000	1	796,470,000	1	796,470,000	1	796,470,000	1	796,470,000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	526,488,000	1	545,067,000	1	545,067,000	1	545,067,000	1	545,067,000	1	545,067,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	6	6	410,242,380	7	677,880,380	7	677,880,380	7	677,880,380	7	677,880,380	7	677,880,380

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	2	10,987,148,540	2	2,468,463,000	2	14,968,463,000	2	14,968,463,000	2	14,968,463,000	2	14,968,463,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	1	475,008,141	1	240,150,000	1	240,150,000	1	240,150,000	1	240,150,000	1	240,150,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1	1	806,089,200	1	433,090,000	1	433,090,000	1	433,090,000	1	433,090,000	1	433,090,000
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	231,566,249,883	1	231,767,669,000	1	231,767,669,000	1	231,467,669,000	1	231,467,669,000	1	231,467,669,000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	587,122,500	1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000	1	18,000,000
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	1	17,622,613,827	1	4,333,944,000	1	4,333,944,000	1	4,333,944,000	1	4,333,944,000	1	4,333,944,000
Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	438,560,000	2	229,620,000	2	229,620,000	2	229,620,000	2	229,620,000	2	229,620,000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	4	4	68,064,000	5	81,540,000	5	81,540,000	5	81,540,000	5	81,540,000	5	81,540,000
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	10	10	100,000,000	10	43,860,000	10	43,860,000	10	43,860,000	10	43,860,000	10	43,860,000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	%		95	187,252,000	100	234,952,000	100	234,952,000	100	234,952,000	100	234,952,000	100	234,952,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	187,252,000	1	234,952,000	1	234,952,000	1	234,952,000	1	234,952,000	1	234,952,000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	80	80	253,045,000	100	928,004,000	100	928,004,000	100	928,004,000	100	928,004,000	100	928,004,000
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan Kesehatan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
Pengendalian dan Pengawasan Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	2	2	67,800,000	2	156,977,000	2	156,977,000	2	156,977,000	2	156,977,000	2	156,977,000
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	5.	5	126,845,000	5	665,977,000	5	665,977,000	5	665,977,000	5	665,977,000	5	665,977,000
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	25	25	58,400,000	30	105,050,000	30	105,050,000	30	105,050,000	30	105,050,000	30	105,050,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	45	45	35,865,680,003	50	39,881,075,434	50	40,000,000,000	50	41,000,000,000	50	41,000,000,000	50	41,000,000,000
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Persen				0,0073		0,0076		0,0080		0,0084		0,0089	
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen				80		86		92		98		100	
	Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen				60		64		70		76		82	
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	1	1	17,093,977,000	1	21,600,130,000	1	21,600,130,000	1	21,600,130,000	1	20,600,130,000	1	19,600,130,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	1.000	1.620	17,093,977,000	1.630	21,600,130,000	1.630	21,600,130,000	1.630	21,600,130,000	1.630	20,600,130,000	1.630	19,600,130,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	Kab/Kota	5	5	18,771,703,003	9	18,280,945,434	9	18,399,870,000	9	19,399,870,000	9	20,399,870,000	9	21,399,870,000
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	1,000	1,000	18,634,561,003	1,500	18,103,146,434	1,500	18,016,820,000	1,500	19,016,820,000	1,500	20,016,820,000	1,500	21,016,820,000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	137,142,000	1	177,799,000	1	383,050,000	1	383,050,000	1	383,050,000	1	383,050,000
SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	Persen	67	67	126,000,000	67	250,701,000	70	286,000,000	74	291,000,000	79	296,000,000	85	301,000,000
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	Persen	100	100	113,400,000	100	164,637,000	100	164,657,000	100	164,657,000	100	164,657,000	100	164,657,000
	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	60.00	60	113,400,000	64	164,637,000	64	164,657,000	64	164,657,000	64	164,657,000	64	164,657,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persen	100	100	12,600,000	100	86,064,000	100	121,343,000	100	126,343,000	100	131,343,000	100	136,343,000
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	3	3	12,600,000	3	86,064,000	3	121,343,000	3	126,343,000	3	131,343,000	3	136,343,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang di berdayakan	Persen	80	80	2,299,024,738	65	685,900,000	70	700,000,000	75	725,000,000	80	750,000,000	85	775,000,000
Advokasi Pemberdayaan Kemitraan. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Persen	80	80	270,943,744	100	99,980,000	100	99,980,000	100	99,980,000	100	99,980,000	100	99,980,000
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan Penggalangan Kemitraan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Persen	100	100	270,943,744	100	99,980,000	100	99,980,000	100	99,980,000	100	99,980,000	100	99,980,000
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persen	80	80	1,791,399,784	100	405,050,000	100	419,150,000	100	444,150,000	100	469,150,000	100	494,150,000
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1.00	1	1,433,217,514	1	183,325,000	1	183,325,000	1	183,325,000	1	183,325,000	1	183,325,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1.00	1	358,182,270	1	221,725,000	1	221,725,000	1	221,725,000	1	221,725,000	1	221,725,000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persen		80	236,681,210	100	180,870,000	100	180,870,000	100	180,870,000	100	180,870,000	100	180,870,000
Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1.00	1	236,681,210	1	180,870,000	1	180,870,000	1	180,870,000	1	180,870,000	1	180,870,000
UTPD BALAI PELATIHAN KESEHATAN					13,429,216,595		6,024,295,994		9,054,859,300		10,225,891,000		11,396,923,000		12,567,955,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Persen	90	90	12,356,312,635	100	5,317,695,994	100	8,304,859,300	100	9,425,891,000	100	10,546,923,000	100	11,667,955,000
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	123,480,000	100		100		100		100		100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Akuntabel	Persen	100	100	0	100	123,480,000	100	123,480,000	100	123,480,000	100	123,480,000	100	123,480,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	123,480,000	12	123,480,000	1	123,480,000	1	123,480,000	1	123,480,000	1	123,480,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	100	100	199,125,000	100	128,732,598	100	218,532,598	100	270,000,000	100	280,000,000	100	350,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3	3	-	1	58,532,598	1	58,532,598	1	100,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	60	112	199,125,000	50	70,200,000	50	160,000,000	50	170,000,000	50	180,000,000	50	200,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	1,627,726,465	100	299,544,696	100	1,622,018,002	100	1,819,478,318	100	3,669,443,000	100	3,451,952,261
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	10	77,716,080	10	51,922,760	3	77,716,080	3	77,716,080	3	80,000,000	3	85,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	10	676,582,762	10	145,034,697	10	669,301,922	10	796,762,238	12	2,594,443,000	12	2,356,952,261
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	3	128,581,704	3	68,591,239	3	130,000,000	3	130,000,000	3	130,000,000	3	130,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket													
Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	1	115,081,919	1	-	3	115,000,000	3	115,000,000	3	115,000,000	3	130,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	629,764,000	12	33,996,000	12	630,000,000	12	700,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	119,631,000	100	-	100	700,000,000	100	700,000,000	100	-	0	1,100,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	3	119,631,000	-	-	0	-	1	700,000,000	-	-	2	1,100,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit				0		1	700,000,000						

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu	Persen	100	100	2,973,108,400	100	2,959,920,000	100	2,997,000,000	100	3,153,657,482	100	3,214,000,000	100	3,314,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	13,112,000	12	12,000,000	12	12,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1,084,996,400	12	1,110,000,000	12	1,110,000,000	12	1,139,657,482	12	1,200,000,000	12	1,300,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1,875,000,000	12	1,837,920,000	12	1,875,000,000	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000	12	2,000,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	4,226,281,770	100	458,428,700	100	643,828,700	100	1,109,275,200	100	960,000,000	100	828,522,739
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	14	88,986,000	17	88,986,000	17	120,000,000	17	130,000,000	18	130,000,000	18	70,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	220	220	294,445,270	230	204,842,700	230	204,842,700	230	230,000,000	230	230,000,000	230	170,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	24	3,842,850,500	24	164,600,000	24	318,986,000	24	749,275,200	24	600,000,000	24	588,522,739
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase realisasi anggaran pendapatan terhadap target proyeksi pendapatan BLUD	Persen	100	100	3,086,960,000	100	1,347,590,000	100	2,000,000,000	100	2,250,000,000	100	2,300,000,000	100	2,500,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	3,086,960,000	1	1,347,590,000	1	2,000,000,000	1	2,250,000,000	1	2,300,000,000	1	2,500,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	35	45	1,072,903,960	50	706,600,000	50	750,000,000	50	800,000,000	50	850,000,000	50	900,000,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan teknis SDM (Kab/Kota)	Kab/Kota	8	9	1,072,903,960	10	706,600,000	10	750,000,000	10	800,000,000	10	850,000,000	10	900,000,000
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	2000	1190	1,072,903,960	800	706,600,000	1000	750,000,000	1250	800,000,000	1500	850,000,000	1800	900,000,000
Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim															
					37,783,213,122		17,039,132,600		17,640,000,000		18,095,000,000		18,550,000,000		19,010,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	32,592,033,348	100	14,689,887,835	100%	15,000,000,000	100%	15,350,000,000	100%	15,700,000,000	100%	16,050,000,000
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang Akuntabel	Persen	100	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000	100	135,000,000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	135,000,000	12	135,000,000	12	135,000,000	12	135,000,000	12	135,000,000	12	135,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	100	100	707,564,000	100	631,731,031	100	165,000,000	100	168,300,000	100	165,000,000	100	165,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	110	110	707,564,000	505	631,731,031	581	165,000,000	668	168,300,000	768	165,000,000	883	165,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	731,869,105	100	1,029,586,144	100	880,970,400	100	898,589,808	100	830,970,400	100	830,970,400
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	48,921,551	1	50,378,078	1	32,000,000	1	32,640,000	2	32,000,000	2	32,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	271,707,554	9	530,144,066	10	355,000,000	12	362,100,000	14	305,000,000	16	305,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	36	411,240,000	36	449,064,000	36	493,970,400	36	503,849,808	36	493,970,400	36	493,970,400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	-	100	76,348,040	100	333,982,844	100	85,662,501	100	83,982,844	100	83,982,844
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	8	250,000,000	0	-	0	-	0	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jenis	0	0	-	3	76,348,040	3	83,982,844	4	85,662,501	5	83,982,844	5	83,982,844
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu	Persen	100	100	5,510,050,800	100	5,522,040,000	100	5,560,000,000	100	5,626,200,000	100	5,560,000,000	100	5,410,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1,225,387,200	12	1,281,000,000	12	1,060,000,000	12	1,081,200,000	12	1,060,000,000	12	910,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	4,284,663,600	12	4,241,040,000	12	4,500,000,000	12	4,545,000,000	12	4,500,000,000	12	4,500,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	1,631,527,300	100	835,426,220	100	425,046,756	100	436,247,691	100	425,046,756	100	425,046,756
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9	427,118,500	9	308,402,540	12	265,000,000	20	267,650,000	20	265,000,000	20	265,000,000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	30	30	1,204,408,800	80	527,023,680	92	160,046,756	92	168,597,691	92	160,046,756	92	160,046,756
Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase realisasi anggaran pendapatan terhadap target proyeksi pendapatan BLUD	Persen	100	100	23,876,022,143	100	6,459,756,400	100	7,500,000,000	100	8,000,000,000	100	8,500,000,000	100	9,000,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	3	3	23,876,022,143	3	6,459,756,400	3	7,500,000,000	3	8,000,000,000	3	8,500,000,000	3	9,000,000,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	98,88	100	4,875,998,774	100	2,349,244,765	100	2,500,000,000	100	2,600,000,000	100	2,700,000,000	100	2,800,000,000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 70%	Persen	98	98	4,726,360,240	98	2,222,882,338	98	2,385,000,000	98	2,505,000,000	98	2,620,000,000	98	2,735,000,000
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	1	1,122,460,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	3	3	198,726,000	0	-	3	496,000,000	3	496,000,000	3	482,500,000	3	496,000,000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	18	18	3,064,200,000	21	1,703,102,630	24	385,000,000	24	291,500,000	27	385,000,000	31	385,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang tersedia	Unit	0	0	-	146	259,476,508	5	2,500,000	6	2,500,000	7	2,500,000	8	352,500,000
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	80	80	340,974,240	4	260,303,200	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000	100	1,500,000,000
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	0	0	-	0	-	1	1,500,000	1	215,000,000	1	250,000,000	1	1,500,000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Presen	80	80	149,638,534	80	126,362,427	80	115,000,000	80	95,000,000	80	80,000,000	80	65,000,000
Pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pengelolaan layanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	2	2	111,878,534	4	126,362,427	1	115,000,000	1	95,000,000	1	80,000,000	1	65,000,000
Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Dokumen	1	1	37,760,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	Persen	0	0	0	0	0	75	50,000,000	75	50,000,000	75	50,000,000	75	50,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	NA	50	315,181,000	0	0	50	140,000,000	55	145,000,000	60	150,000,000	65	160,000,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Persen	NA	70	315,181,000	0	0	0	140,000,000	50	145,000,000	0.00	150,000,000	0.00	160,000,000
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	Na	50	315,181,000	0	0	50	140,000,000	55.	145,000,000	60.00	150,000,000	65.00	160,000,000
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	0	- 0	0	-0	0	50	0	55	0	0.00	-	0.00	-
UTPD Laboratorium Kesehatan					16,713,209,514		9,062,764,527		9,520,000,000		10,040,000,000		10,560,000,000		11,080,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	90	90	15,886,751,994	100	8,616,533,200	100	9,020,000,000	100	9,520,000,000	100	10,020,000,000	100	10,520,000,000
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	persen	0	100	0	100		100		100		100		100	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	0	100	0	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	-	4	-	0	-	0	-	0	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	0	0	1	-	1	-	1	-	1	-	0	-

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	0	0	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu	Persen	12	12	2,937,142,480	12	2,179,420,000	12	2,161,800,000	12	2,188,812,000	12	2,229,564,300	12	2,257,667,600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1,020,000,000	12	828,700,000	12	811,200,000	12	811,200,000	12	824,400,000	12	824,400,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	24	1,917,142,480	24	1,350,720,000	24	1,350,600,000	24	1,377,612,000	24	1,405,164,300	24	1,433,267,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	-	100	-	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	0	0		1	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase realisasi anggaran pendapatan terhadap target proyeksi pendapatan BLUD	Persen	0	100	12,949,609,514	100	6,437,113,200	100	6,808,200,000	100	7,281,188,000	100	7,740,435,700	100	8,212,332,400
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	12,949,609,514	1	6,437,113,200	1	6,808,200,000	1	7,281,188,000	1	7,740,435,700	1	8,212,332,400
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Klinis yang dilakukan dalam satu tahun	Pemeriksaan	88	88,2	826,457,520	94,000	446,231,327	98,700	500,000,000	103,635	520,000,000	108,800	540,000,000	114,200	560,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 70%	Persen	100	100	826,457,520	100	446,231,327	100	500,000,000	100	520,000,000	100	540,000,000	100	560,000,000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	23	23	283,656,908	24	-	26	-	27	-	28	-	29	-
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	38	38	542,800,612	7	446,231,327	8	500,000,000	9	520,000,000	10	540,000,000	11	560,000,000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	0	-	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	0	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	0	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
UPTD RSUD AJI MUHAMMAD SALEHUDDIN II (RSUD AMS II) ESK RSUD KORPRI					23,332,848,060		12,950,124,600		13,390,000,000		13,745,000,000		14,100,000,000		14,460,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD AMS II)	Indeks	90	90	15,300,903,888	90.3	10,545,867,020	90.6	10,750,000,000	90.8	11,000,000,000	91	11,250,000,000	91.5	11,500,000,000
	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan	Persen	100	100	126,720,000	100	111,720,000	100	100,200,000	100	100,200,000	100	100,200,000	100	100,200,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Keuangan yang Akutable														
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	126,720,000	12	111,720,000	12	100,200,000	12	100,200,000	12	100,200,000	12	100,200,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi barang milik daerah SKPD	Persen	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	100	100	1,414,968,867	100	140,083,701	100	140,083,701	100	140,083,701	100	140,083,701	100	140,083,701
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	11	2	119,307,867	1	917,031	3	917,031	3	917,031	3	917,031	3	917,031
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	239	102	1,295,661,000	1	139,166,670	102	139,166,670	115	139,166,670	125	139,166,670	135	139,166,670
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	1,459,008,706	100	420,012,765	100	365,328,645	100	365,973,999	100	430,165,831	100	459,309,989
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3	73,980,161	1	25,176,659	1	25,176,659	1	27,176,659	1	57,837,362	1	76,981,520
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	19	338,081,488	10	118,392,488	8	117,475,457	6	99,714,371	8	112,328,469	8	113,328,469
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	19	7	115,491,795	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	359,164,078	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	224,165,184	2	46,899,618	2	51,899,618	2	54,082,969	2	65,000,000	2	69,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	348,126,000	12	229,544,000	12	170,776,911	12	185,000,000	12	195,000,000	12	200,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	747,211,499	100	17,970,354	100	20,745,354	100	23,500,000	100	25,500,000	100	53,500,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	0	-	0	-	0	-	1	1,846,899	0	-	0	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	8	7	215,639,107	1	17,970,354	1	17,970,354	1	18,153,101	1	22,000,000	2	50,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	39	531,572,392	0	-	1	2,775,000	2	3,500,000	2	3,500,000	2	3,500,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang yang disediakan tepat waktu	Persen	100	100	7,843,987,128	100	7,151,220,000	100	7,151,220,000	100	7,173,320,000	100	7,257,128,168	100	7,349,984,010
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1,155,030,400	12	1,277,900,000	12	1,277,900,000	12	1,300,000,000	12	1,383,808,168	12	1,476,664,010
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	6,688,956,728	12	5,873,320,000	12	5,873,320,000	12	5,873,320,000	12	5,873,320,000	12	5,873,320,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	Persen	100	100	809,566,916	100	395,119,800	100	372,422,300	100	396,922,300	100	396,922,300	100	396,922,300
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	11	389,488,000	8	142,344,800	7	122,422,300	7	122,422,300	7	122,422,300	7	122,422,300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	107	75	420,078,916	1	252,775,000	60	250,000,000	65	274,500,000	65	274,500,000	65	274,500,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase realisasi anggaran pendapatan terhadap target proyeksi pendapatan BLUD	Persen	100	100	2,899,440,772	100	2,309,740,400	100	2,600,000,000	100	2,800,000,000	100	2,900,000,000	100	3,000,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	2,899,440,772	1	2,309,740,400	1	2,600,000,000	1	2,800,000,000	1	2,900,000,000	1	3,000,000,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD AMS II)	Persen		75	8,031,944,172	88	2,265,090,910	88.2	2,500,000,000	88.4	2,600,000,000	88.6	2,700,000,000	88.8	2,800,000,000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 70%	Persen	90	90	7,408,693,438	75	2,044,732,510	75.3	2,157,689,000	75.6	2,214,462,900	75.9	2,286,000,000	76.0	2,302,500,000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	748	157	3,235,746,604	1	304,890,510	15	318,889,000	20	355,561,800	25	358,479,184	30	361,479,184
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	652	403	364,238,900	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam	Unit	1	1	945,097,060	1	1,042,000	1	100,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit														
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	8	10	2,863,610,874	8	1,738,800,000	6	1,738,800,000	6	1,748,901,100	6	1,817,520,816	6	1,831,020,816
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya yang Disediakan	Paket	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	80	494,758,234	100	210,358,400	100	317,311,000	100	349,537,100	100	360,000,000	100	400,000,000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	12	227,497,234	1	210,358,400	12	317,311,000	12	349,537,100	12	360,000,000	12	400,000,000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	12	267,261,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penerapan system informasi kesehatan terintegrasi	Persen	96	95	128,492,500	100	10,000,000	100	25,000,000	100	36,000,000	100	54,000,000	100	97,500,000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	6	12	128,492,500	1	10,000,000	2	25,000,000	2	36,000,000	2	54,000,000	2	97,500,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	80	-	80	139,166,670	85	140,000,000	90	145,000,000	95	150,000,000	100	160,000,000
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Mansia Kesehatan untuk	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Persen	80	80	-	80	139,166,670	85	140,000,000	90	145,000,000	95	150,000,000	100	160,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
UKM dan UKP Provinsi															
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	9	9	-	10	139,166,670	11	140,000,000	12	145,000,000	14	150,000,000	15	160,000,000
UOBK RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda					860,097,806,266		987,757,869,000		1,013,004,100,000		1,063,154,305,000		1,116,312,021,000		1,172,527,622,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	86.96	87	19,918,662,671	87.1	23,091,224,761	87.2	24,000,000,000	87.3	25,000,000,000	87.4	26,000,000,000	87.5	27,000,000,000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 70%	Persen	0	80	18,343,661,403	98	23,091,224,761	98,5	23,038,000,000	99	23,887,000,000	100	24,706,000,000	100	25,585,000,000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	0	0	-	0	-	2	15,000,000,000	2	15,000,000,000	3	500,000,000	1	1,000,000,000
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	4	3,000,000,000	0	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	0	0	-	0	-	2	838,000,000	2	637,000,000	1	406,000,000	-	-
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	369	60	17,170,400,283	167	23,091,224,761	178	4,700,000,000	51	5,650,000,000	68	18,100,000,000	68	21,785,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	50	1,000,000,000	50	1,000,000,000	50	1,000,000,000	50	1,000,000,000
Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Unit	4589	2260	1,173,261,120	0	-	3,816	1,500,000,000	4,118	1,600,000,000	4420	1,700,000,000	4420	1,800,000,000
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian jenis layanan berbasis kompetensi	Persen	0	25	1,274,282,741	63	-	71	662,000,000	92	763,000,000	96	894,000,000	100	965,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	0	4	-	4	-	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	0	4	-	4	-	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	4	519,732,741	4	-	4	600,000,000	4	700,000,000	4	800,000,000	4	900,000,000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	0	12	-	12	-	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	0	4	-	4	-	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	4	-	4	-	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	4	-	4	-	4		4		4	30,000,000	4	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	12	754,550,000	12	-	12	7,000,000	12	8,000,000	12	9,000,000	12	10,000,000
Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	0	8	-	8	-	8	5,000,000	8	5,000,000	8	5,000,000	8	5,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penerapan sistem informasi kesehatan terintegrasi	Persen	50	80	300,718,527	85		90	300,000,000	95	350,000,000	100	400,000,000	100	450,000,000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolalan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	3	26	300,718,527	4	-	4	300,000,000	4	350,000,000	4	400,000,000	4	450,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	0	45	1,854,406,350	50	334,000,000	55	350,000,000	60	375,000,000	65	400,000,000	70	420,000,000
Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	Persen		100	0	100	-	100	8,000,000	100	9,000,000	100	6,000,000	100	8,000,000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		2,221	0	2,273	-	2,291	8,000,000	2,313	9,000,000	2,327	6,000,000	2,328	8,000,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provins	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	Persen	59	61	1,854,406,350	62	334,000,000	63	342,000,000	64	366,000,000	65	394,000,000	66	412,000,000
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	668	1292	1,854,406,350	1313	334,000,000	1334	340,000,000	1355	362,000,000	1377	390,000,000	1398	407,000,000
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	-	1	-	1	2,000,000	1	4,000,000	1	4,000,000	1	5,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian	Indeks	80	82	838,324,737,245	83	964,332,644,239	84	988,654,100,000	85	1,037,779,305,000	86	1,089,912,021,000	87	1,145,107,622,000
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Persen	100	100	651,359,783	100	-	100	100,000,000	100	110,000,000	100	800,000,000	100	140,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	16	464,558,000	16	-	16	50,000,000	16	55,000,000	16	400,000,000	16	70,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	38	22	186,801,783	22	-	22	50,000,000	22	55,000,000	22	400,000,000	22	70,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan akuntansi yang tepat waktu.	Persen	85	80	286,689,030,328	85	384,122,644,239	90	374,507,297,800	95	388,922,502,800	100	403,458,593,800	100	402,020,682,300
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	1100	1470	285,989,013,618	2105	383,813,284,239	2123	374,152,937,800	2313	388,523,142,800	2327	401,949,233,800	2328	401,666,322,300
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	309,600,000	12	309,360,000	12	309,360,000	12	309,360,000	12	309,360,000	12	309,360,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	0	4	-	4	-	4	15,000,000	4	30,000,000	32	400,000,000	32	15,000,000
Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	21	21	195,600,000	4	-	4	15,000,000	4	30,000,000	4	400,000,000	4	15,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	0	18	194,816,710	34	-	34	15,000,000	34	30,000,000	34	400,000,000	34	15,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen/laporan barang milik daerah yang sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku.	Persen	100	80	10,600,000	85	-	90	11,375,000	95	11,375,000	100	35,000,000	100	11,512,500
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	2	10,600,000	4	-	4	9,375,000	4	9,375,000	4	25,000,000	4	9,512,500
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	5	-	4	-	4	1,000,000	4	1,000,000	4	5,000,000	4	1,000,000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	3	-	4	-	4	1,000,000	4	1,000,000	4	5,000,000	4	1,000,000
Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di laksanakan Rumah Sakit	Persen	80	100,673,820	85	-	90	12,000,000	95	12,000,000	100	880,000,000	100	12,000,000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0	-	2	-	2	3,000,000	2	3,000,000	2	20,000,000	2	3,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	1	0	-	0	-	0	-	0	-	1	800,000,000	0	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	12	61,573,820	38	-	38	3,000,000	38	3,000,000	38	20,000,000	38	3,000,000
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	1	4,400,000	12	-	12	3,000,000	12	3,000,000	12	20,000,000	12	3,000,000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	550	34,700,000	250	-	250	3,000,000	250	3,000,000	250	20,000,000	250	3,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	2,584,437,151	100	-	100	650,000,000	100	800,000,000	100	1,850,000,000	100	750,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Paket	567	139	1,543,533,071	0	-	330	100,000,000	327	150,000,000	327	400,000,000	327	200,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang di sediakan	Paket	2	3	229,754,080	0	-	3	20,000,000	3	20,000,000	3	200,000,000	3	20,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	1	-	2	-	2	20,000,000	2	20,000,000	2	200,000,000	2	20,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	288	112	811,150,000	108	-	108	500,000,000	108	600,000,000	108	1,000,000,000	108	500,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	12	-	12	-	12	10,000,000	12	10,000,000	12	50,000,000	12	10,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	2,152,061,463	100	3,200,000,000	100	1,450,000,000	100	5,200,000,000	100	7,865,000,000	100	550,000,000
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	2	0	-	1	3,200,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-
Pengadaan Mebel	Jenis Paket Mebel yang disediakan	Paket	29	14	278,208,104	0	-	33	50,000,000	30	200,000,000	23	2,000,000,000	23	50,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	267	60	1,456,115,579	0	-	359	200,000,000	358	500,000,000	327	3,865,000,000	327	300,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	2	1,000,000,000	2	3,000,000,000	0	-	0	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	200	100,000,000	120	1,000,000,000	120	1,000,000,000	120	100,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	12	417,737,780	0	-	26	100,000,000	21	500,000,000	21	1,000,000,000	21	100,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	1,136,574,700	100	-	100	1,923,427,200	100	2,723,427,200	100	3,023,427,200	100	2,423,427,200

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	26	40	279,921,000	0	-	29	279,921,000	29	279,921,000	29	279,921,000	29	279,921,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	-	0	-	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	5	4	293,506,200	0	-	4	293,506,200	4	293,506,200	4	293,506,200	4	293,506,200
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	3	13	563,147,500	0	-	0	-	1	700,000,000	1	800,000,000	1	500,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	-	0	-	80	500,000,000	60	600,000,000	70	700,000,000	80	500,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	-	0	-	300	700,000,000	300	700,000,000	300	800,000,000	300	700,000,000
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase realisasi anggaran pendapatan terhadap target proyeksi pendapatan BLUD	Persen	91	75	545,000,000,000	100	577,010,000,000	100	610,000,000,000	100	640,000,000,000	100	672,000,000,000	100	739,200,000,000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1	545,000,000,000	1	577,010,000,000	1	610,000,000,000	1	640,000,000,000	1	672,000,000,000	1	739,200,000,000
UOBK RSUD Djatiwibowo Balikpapan	Kanujoso				836,453,156,580		758,420,995,000		842,000,119,000		905,420,557,000		973,930,857,000		1,047,958,206,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAJA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAJA	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Persen	95.66	88,5	42,708,522,988	93%	15,000,000,000	94%	16,000,000,000	95%	17,000,000,000	95,50%	18,000,000,000	96%	18,000,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
KESEHATAN MASYARAKAT															
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi SPA minimal 70%	Persen	NA	90	42,708,522,988	90%	14,498,000,000	90%	15,498,000,000	90%	16,498,000,000	90%	17,498,000,000	90%	17,498,000,000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	NA	NA	0	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,000,000,000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	NA	NA	0	5 Unit	1,000,000,000	5 Unit	1,000,000,000	6 Unit	1,000,000,000	6 Unit	1,000,000,000	6 Unit	1,000,000,000
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Unit	31	36	39,094,185,396	13	12,498,000,000	14	13,498,000,000	15	14,498,000,000	15	15,498,000,000	16	15,498,000,000
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	0	2	3,614,337,592	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	90	90	-	90	2,000,000	90	2,000,000	90	2,000,000	90	2,000,000	90	2,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	1	-	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	2	2		2		2		2		2		2	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penyelesaian dan implementasi sistem informasi kesehatan terintegrasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.	Persen	60	60		60	500,000,000	70	500,000,000	80	500,000,000	90%	500,000,000	100	500,000,000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolalan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	3	3		3	500,000,000	4	500,000,000	3	500,000,000	4	500,000,000	3	500,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Kesehatan	Persen	78.60	60	30,000,000	63	5,000,000,000	65	350,000,000	67	375,000,000	69	400,000,000	70	420,000,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMk melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	Persen	78,6	60	30,000,000	63	5,000,000,000	65	350,000,000	67	375,000,000	69	400,000,000	70	420,000,000
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	Orang	4	4	30,000,000	65	5,000,000,000	65	350,000,000	65	375,000,000	65	400,000,000	65	420,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	97.96	98.4	793,714,633,592	98.4	738,420,995,000	98.4	825,650,119,000	98.4	888,045,557,000	98.5	955,530,857,000	98.5	1,029,538,206,000
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	Persen	NA	NA	0	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000	100	2,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	NA	NA	0	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000	10	1,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	NA	NA	0	6	1,000,000	6	1,000,000	6	1,000,000	6	1,000,000	6	1,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target												
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	Persen	100		100	219,180,559,118	100%	229,931,663,543	100%	266,659,320,385	100%	285,526,495,619	100%	300,692,228,716	100%	316,195,437,694
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	1147	1152	219,180,559,118	1739	229,931,663,543	1942	266,659,320,385	2131	285,526,495,619	2301	300,692,228,716	2454	316,195,437,694	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen/laporan barang milik daerah yang sesuai dengan jadwal dan peraturan yang berlaku.	Persen	NA	NA	0	100	37,320,000	100	37,320,000	100	37,320,000	100%	37,320,000	100%	37,320,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	NA	NA	0	4	37,320,000	4	37,320,000	4	37,320,000	4	37,320,000	4	37,320,000	
Administrasi kepegawaian Daerah	Persentase realisasi pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Persen	NA	NA	0	100	2,949,264,200	100	1,355,232,000	100	1,319,568,000	100	1,350,774,000	100	2,949,264,200	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	NA	NA	0	1486	2,949,264,200	1486	1,355,232,000	1486	1,319,568,000	1486	1,350,774,000	1486	2,949,264,200	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pencapaian seluruh kegiatan administrasi umum Rumah Sakit	Persen	NA	NA	0	100	1,500,000,000	100	6,585,432,105	100	2,178,385,565	100	2,178,385,565	100	2,089,722,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Paket	NA	NA	0	1	500,000,000	1	5,085,432,105	1	678,385,565	1 Paket	678,385,565	4 Paket	589,722,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konslutasi SKPD	Laporan	NA	NA	0	12	1,000,000,000	12	1,500,000,000	12	1,500,000,000	12	1,500,000,000	12	1,500,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan jadwal dan kebutuhan Rumah Sakit.	Persen	NA	NA	0	100	3,000,000,000	100	6,000,000,000	100	6,000,000,000	100	6,000,000,000		6,000,000,000	
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit kendaran dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	NA	NA	0	1	500,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	1	1,000,000,000	

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengadaan Mebel	Jenis Paket Mebel yang disediakan	Paket	NA	NA	0	1	2,000,000,000	1	4,500,000,000	1	4,500,000,000	1	4,500,000,000	0	4,500,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	267	60	1,456,115,579	0	0.00	359	200,000,000	358	500,000,000	327	3,865,000,000	327	300,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0.00	2	1,000,000,000	2	3,000,000,000	0	0	0	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0.00	200	100,000,000	120	1,000,000,000	120	1,000,000,000	120	100,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	12	417,737,780	0	0.00	26	100,000,000	21	500,000,000	21	1,000,000,000	21	100,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Persen	80	80	1,136,574,700	0	0.00	90	1,923,427,200	95	2,723,427,200	100	3,023,427,200	100	2,423,427,200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaran dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	26	40	279,921,000	0	0	29	279,921,000	29	279,921,000	29	279,921,000	29	279,921,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	0	0	0	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Unit	5	4	293,506,200.00	0	0	4	293,506,200	4	293,506,200	4	293,506,200	4	293,506,200.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Unit	3	13	563,147,500.00	0	0	0	-	1	700,000,000	1	800,000,000	1	500,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0.00	0	0	80	500,000,000	60	600,000,000	70	700,000,000	80	500,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel in 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan Berdasarkan Target Proyeksi Pendapatan BLUD	Persen	109	100	574,534,074,474	100	489,000,747,257	100	533,010,814,510	100	580,981,787,816	100	633,270,148,719	100	690,264,462,106
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	22	22	574,534,074,474	24	489,000,747,257	24	533,010,814,510	24	580,981,787,816	24 Unit Kerja	633,270,148,719	24 U	690,264,462,106
UOBK RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda					110,934,497,000		102,951,646,000		105,356,328,000		110,849,145,000		116,041,602,000		121,443,682,000
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persen	100	100	4,231,816,575	100	2,898,000,000	100	3,000,000,000	100	3,250,000,000	100	3,500,000,000	100	3,750,000,000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi SPA minimal 70%	Persen	91,81	91,83	3,704,328,925	91,85	2,898,000,000	91,87	1,583,200,275	91,89	1,618,043,088	91,91	1,610,636,451	91,93	1,862,359,703
Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1: 1000	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	1	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	3	4	1,353,274,200	3	1,000,367,100	2	587,284,487	3	646,012,935	3	710,614,229	4	781,675,652
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	37	1,896,366,725	165	1,750,000,000	165	631,468,476	165	591,138,110	165	550,022,222	165	681,702,803
Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit	881	2.410	217383250	0	0.	2.915	50,000,000	3.200	50,000,000	3.530	50,000,000	3.880	50,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	345	469	182,172,300	0	0	473	150,000,000	475	150,000,000	477	150,000,000	479	150,000,000
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan.	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	6	3	123,551,700	4	147,632,900	4	164,447,312	4	180,892,043	4	150,000,000	4	198,981,248
Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian jenis layanan berbasis kompetensi	Persen	14.29	28.57	1,171,778,000	0.00	0.00	57.14	1,409,247,485	71.43	1,623,649,449	85.71	1,880,225,339	100	1,877,588,266
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	5	4	1,100,838,000	0	0	4	242,550,000	4	267,411,375	4	280,781,944	4	280,781,944
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis	Orang	0	10	70,940,000	0	0	40	148,176,000	40	163,364,040	40	171,532,242	40	171,532,242
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	-	0	0	0	0	2	606,385,485	2	749,524,034	2	984,561,153	2	981,924,080
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	12	0	0	0	24	312,136,000	24	343,350,000	24	343,350,000	24	343,350,000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	0	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase penerapan system informasi kesehatan terintegrasi	Persen	-	16.67	6,241,520	33.33	0	50.00	7,552,240	66.67	8,307,463	83.33	9,138,210	100	10,052,031
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4	4	6,241,520	0	0	4	7,552,240	4	8,307,463	4	9,138,210	4	10,052,030
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Persentase	95,79	95,82	1,713,016,000	95,83	0	95,83	200,000,000	95,84	200,000,000	95,85	200,000,000	95,86	200,000,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel in e 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Perencanaan Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai standar	Persen	92,4	92,45	500,000,000	92,50	0	92,55	100,000,000	92,60	100,000,000	92,65	100,000,000	92,70	100,000,000
Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	308	308	500,000,000	308	0	308	100,000,000	308	100,000,000	308	100,000,000	308	100,000,000
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan minimal 20 JPL	Persen	95,79	100	1,213,016,000	100	0	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang		302	1,213,016,000	302	0	302	100,000,000	302	100,000,000.00	302	100,000,000	302	100,000,000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	98,40	98,41	104,989,664,425	98,42	100,053,646,000	98,43	102,156,328,000	98,44	107,399,145,000	98,45	112,341,602,000	98,46	117,493,682,000
	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	100		100		100		100		100		100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Persen	100	100	443,138,000	100	0	100	50,000,000	100	55,000	100	60,500,000	100	66,550,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	5	140,058,000	4	0	4	25,000,000	4	27,500,000	4	30,250,000	4	33,275,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	303,080,000	5	0.00	5	25,000,000	5	27,500,000.00	5	30,250,000	5	33,275,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen/laporan keuangan dan akuntansi yang tepat waktu.	Persen	100	100	66,665,045,385	100	68,572,448,985	100	64,703,388,000	100	68,719,807,400	100	71,737,172,770	100	73,505,544,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	308	411	66,235,965,385	409	68,319,368,985	409	64,400,000,000	409	68,400,000,000	409	71,400,000,000	409	73,150,000,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	253,080,000	12	253,080,000	12	278,388,000	12	292,307,400	12	306,922,770	12	322,269,000

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	19	176,000,000	19	0	19	25,000,000	19	27,500,000	19	30,250,000	19	33,275,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di laksanakan Rumah Sakit	Persen	0	100	1,312,963,050	100	0	100	487,885,291	100	490,000,000	100	539,000,000	100	592,900,000
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	3	832,963,050	0	0	1	307,885,291	1	310,000,000	1	341,000,000	1	375,100,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	108	108	480,000,000	108	0	108	180,000,000	108	180,000,000	108	198,000,000	108	217,800,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	1,588,770,994	0	0	100	608,643,518	100	769,507,868	100	836,458,656	100	910,104,520
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	13	36,606,722	0	0	13	44,294,134	13	48,723,547	13	53,595,902	13	58,955,492
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	7	120,178,412	0	0	7	145,415,879	7	159,957,466	7	175,953,213	7	193,548,534
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	14	218,799,260	0	0	14	164,747,105	14	291,221,815	14	320,343,997	14	352,378,396
Penyediaan Barang dan Pnggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pnggandaan yang Disediakan	Paket	0	1	35,346,600	0	0	1	25,000,000	1	27,500,000	1	30,250,000	1	33,275,000.00
Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	63	1,077,840,000	0	0.	104	204,186,400	107	214,605,040	110	226,065,544.00	113	238,672,098.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10	11	100,000,000	0	0	12	25,000,000	13	27,500,000	14	30,250,000.00	15	33,275,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Persentase	100	100	2,164,279,495	0		100	1,818,778,189	100	980,656,008	100	1,468,721,609.00	100	3,385,593,770

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel in 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	400,000,000.00	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	2	900,000,000	0	0	0	0	0.00	5	1,900,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	10	367,650,887	0	0	14	444,857,573	16	489,343,331	18	538,277,664.00	20	592,105,430
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	432	1,796,628,608	0	0	114	473,920,616	118	491,312,677	128	530,443,945.00	215	893,488,340
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Operasional Rumah Sakit	Persen	100	100	9,075,459,002	100	7,036,927,815	100	7,977,230,393	100	8,074,953,432	100	8,282,173,775.00	100	8,610,102,402
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	1	7,500,000	0	0.	1	5,000,000	1	5,500,000	1	5,775,000	1	6,063,750
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	48	1,794,374,050	48	2,023,006,015	48	2,171,192,601	48	2,388,311,861	48	2,627,143,047	48	2,889,857,351
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	7,273,584,952	2	5,013,921,800	3	5,801,037,792	3	5,681,141,571	3	5,649,255,728	3	5,714,181,301
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Persen	100	100	740,008,499	100	444,269,200	100	1,010,402,609	100	1,309,220,292	100	1,417,575,190	100	1,422,887,308
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	42,319,999	1	42,320,000	1	51,207,198	1	56,327,919	2	61,960,710	2	68,156,786
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	27	522,688,500	27	401,949,200	29	442,144,120	29	695,698,394	29	765,268,233	34	841,795,056

Nomenklatur Urusan Provinsi	Indikator	Satuan	Basel ine 2024	Target											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	277	123	75,000,000	0	0	82	217,051,291	82	257,193,979	82	290,346,247	82	212,935,466
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	1	100,000,000	0	0	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000
Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Anggaran Pendapatan terhadap Target Proyeksi Pendapatan BLUD	Persen	100	100	23,000,000,000	100	24,000,000,000	100	25,500,000,000	100	27,000,000,000	100	28,000,000,000	100	29,000,000,000
Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	15	1	23,000,000,000	1	24,000,000,000	1	25,500,000,000	1	27,000,000,000	1	28,000,000,000	1	29,000,000,000

4.2 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah


Uraian sub kegiatan merupakan penjabaran teknis dan operasional dari program serta kegiatan yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sub kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, disusun secara sistematis dan terarah guna mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan dasar bidang kesehatan.

Sub kegiatan juga disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan, sehingga pelaksanaannya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi sistem kesehatan nasional.

Subkegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 2 Daftar Subkegiatan Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran 5: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas Upaya kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Kegiatan: Penyediaan Faslitas Pelayanan Sarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi
			Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya
			Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. dll)
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
			Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
			Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			

Sasaran 5: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
		Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	

Sasaran 5: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</p> <p>Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional</p> <p>Kegiatan: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan</p> <p>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</p> <p>Kegiatan: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> <p>Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit</p> <p>Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan</p>
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	<p>Kegiatan: Perencanaan Kebutuhan SDM untuk UKM dan UKP Provinsi</p> <p>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Kegiatan: Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Tingkat daerah provinsi</p> <p>Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>

Sasaran 5: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			
No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan Penggalangan Kemitraan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
			Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya Efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
			Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah provinsi. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaannya, digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur kinerja yang bersifat strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

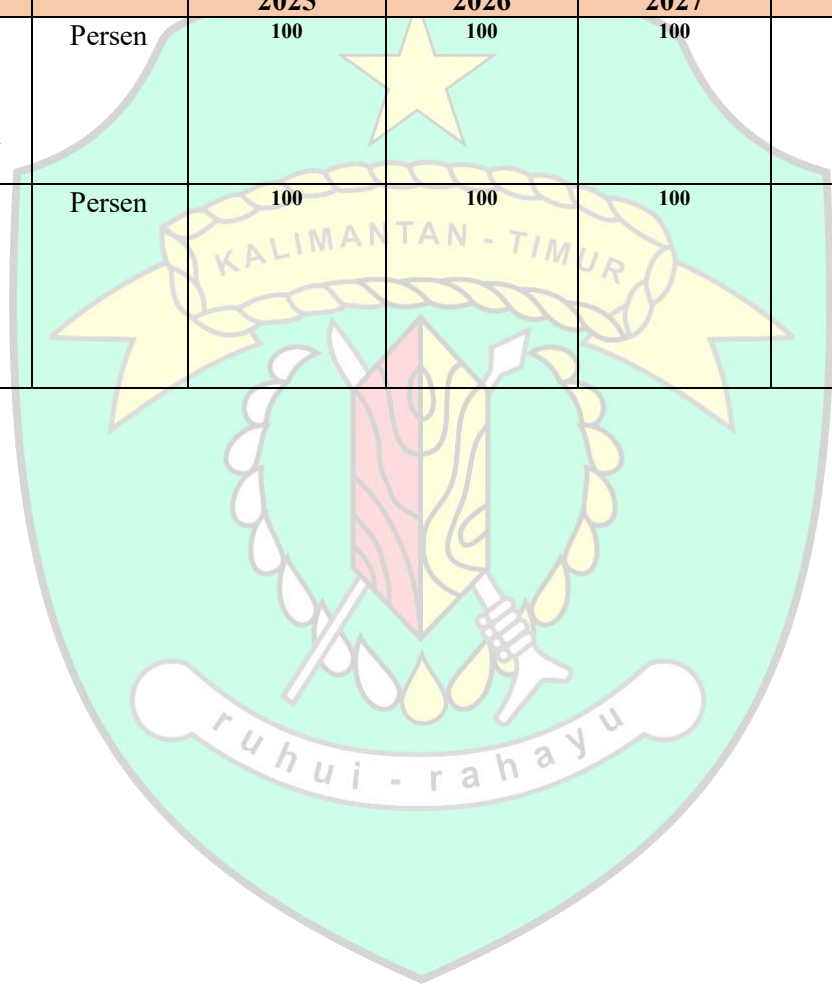


Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.94	74.99	75.04	75.08	75.13	75.18	75.25
2	Prevalensi Stunting	Persen	22.2	19.8	18.4	17.2	16	14.8	13.9
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Persen	87	87.5	88	88	88.5	89	89.5
4	Persentase Rumah Sakit milik Pemerintah dengan SDMK sesuai standar	Persen	62	54	60	64	70	76	78
5	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan SPA sesuai Standar	Persen	73.94	74	80	86	92	98	100
6	Kabupaten/Kota dengan Peningkatan Nilai SPM Kesehatan	Kab/Kota	7	7	8	9	9	10	10
7	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68.60	74	78	82	85	87	89

Tabel 4.6 Pelayanan (Capaian SPM Provinsi) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Traget					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provins (Keracunan Makanan, Diptheri, Malaria dan DBD)	Persen	100	100	100	100	100	100



4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan kewenangan daerah yang mencakup urusan wajib dan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengukur capaian kinerja dari pelaksanaan urusan tersebut secara objektif, digunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai tolok ukur minimum kinerja urusan wajib pelayanan dasar, termasuk urusan kesehatan



Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Per 100.0000 Penduduk	1.83	1.78	1.78	1.78	1.80	1.80	1.80
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka Kematian Ibu	Orang Per 100.000 Kelahiran Hidup	177	169	150	132	117	104	104
5	Angka Kematian Balita (bayi dan balita)	Orang Per 1.000 Kelahiran hidup	18.04	15.87	14.74	13.65	13.01	12,40	12
6	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	n/a	36	46	55	61	70	80
7	Cakupan Imunisasi bayi lengkap	Persen	75.38	80	85	90	95	95	95
8	Cakupan Imunisas HPV	Persen	90	90	90	90	90	90	90
9	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	NA	70	70	76	83	90	96

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	86.01	88	90	92	94	96	98
11	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	Persen	1.89	10	20	35	50	60	90
12	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	Persen	57,10	58	60	62	64	66	68
13	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)								
a	Angka Penemuan Kasus TB	per 100.000 penduduk	58,80	85	85	85	85	85	85
b	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (<i>treatment success rate</i>)	Persen	86.10	90	90	90	90	90	90
14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	100.88	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95
15	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan Kader Resiko <i>Stunting</i>	Kab/Kota	NA	3	3	3	3	3	3
16	Jumlah Kader Pendamping Keluarga Risiko <i>Stunting</i> yang ditingkatkan kapasitasnya	Kader	NA	610	610	610	610	610	610
17	Jumlah Penerima Manfaat Gratis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	orang	NA	491,691	492,352	491,691	491,691	491,691	491,691

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Jumlah penerima manfaat gratis biaya berobat pada Rumah Sakit Provinsi di luar cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	orang	n/a	1,000	1,400	1,358	1,324	1,298	1,278
19	Indeks Keluarga Sehat	Persen	0,286*	0,302	0,318	0,336	0,355	0,375	0,396
20	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
21	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan merupakan proses penting dalam merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan kesehatan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan sejalan dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional.

Melalui proses identifikasi isu strategis, analisis data, konsultasi publik, serta pelibatan lintas sektor, Renstra Dinas Kesehatan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, tantangan di lapangan, serta potensi yang dimiliki daerah. Renstra ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan selama lima tahun ke depan, dengan fokus pada:

1. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan,
2. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular,
3. Percepatan perbaikan gizi masyarakat,
4. Penguatan sistem kesehatan daerah,
5. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Fokus utama adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pencapaian sasaran nasional serta daerah, dan adaptasi terhadap perubahan demografi, lingkungan, epidemiologi, teknologi. Dokumen Renstra bukan hanya sebagai formalitas perencanaan, tetapi sebagai pedoman operasional bagi Dinkes dalam lima tahun ke depan — mencakup program, kegiatan, indikator, target dan alokasi sumber daya.

Tantangan substansial meliputi: dinamika epidemiologi penyakit, perubahan demografi dan lingkungan, kemajuan teknologi kesehatan, serta kebutuhan kerjasama lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, Renstra harus didukung dengan pemantauan kinerja yang baik, mekanisme pengendalian yang jelas, dan evaluasi secara periodik agar tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan situasi.

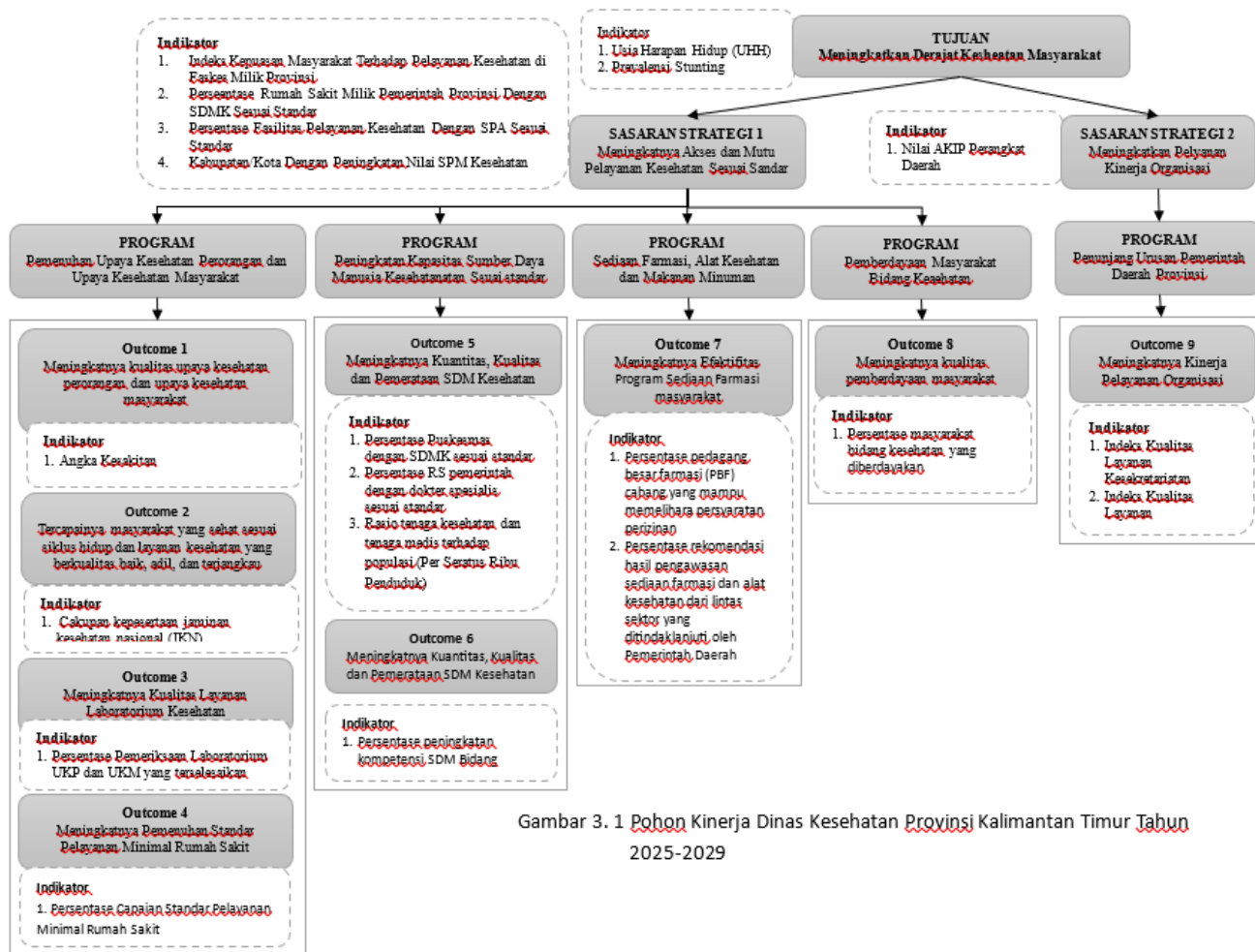
Penetapan indikator kinerja strategis (outcome) dan indikator kinerja operasional (output) yang akan digunakan untuk memantau capaian periodik. Pengembangan sistem pelaporan berkala (misalnya triwulanan, semester) untuk capaian fisik dan keuangan program/kegiatan Dinkes, serta mekanisme review jika terjadi deviasi.

Kesuksesan implementasi Renstra sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik dari pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, mitra pembangunan, maupun sektor swasta. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, diharapkan pembangunan kesehatan dapat berlangsung lebih merata dan berdampak langsung pada peningkatan derajat kesehatan Masyarakat.



LAMPIRAN

Lampiran I. CASCADING KINERJA



Gambar 3. 1 Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

Lampiran III Keselarasan program Kepala Daerah dengan program prioritas daerah

Tabel 4.9 Keselarasan program Kepala Daerah dengan program prioritas daerah

No	Program Unggulan Kepala Daerah	Nomenklatur Program RENSTRA
1	Gratispol 2 Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan Berkualitas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Gratispol 3 Gratis Hidup Sehat Tanpa <i>Stunting</i>	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Jospol 6 Membangun dan Meningkatkan Insfratraktur Kesehatan dan Pendidikan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat